

## PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Parit Malintang, 26 Juni 2026**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman



**Budi Mulya, ST., M.Eng**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19770702 200501 1 005

| Paraf Verifikasi  |  |
|-------------------|--|
| Ka. Bapelitbangda |  |
| Inspektur         |  |
| Kabag Organisasi  |  |



**DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



# LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH [ LKJIP ] TAHUN 2025

**DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

<http://disdikbud.padangpariamankab.go.id>



## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Seiring dengan komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kami dengan bangga menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025.

LAKIP menjadi sebuah dokumen yang memuat evaluasi kinerja dan pencapaian OPD dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode tertentu. Dokumen ini tidak hanya mencerminkan pencapaian, tetapi juga memperlihatkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui LAKIP ini, kami berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja OPD selama periode yang bersangkutan. Kami menyajikan data, analisis, dan narasi yang komprehensif guna memberikan pemahaman yang mendalam kepada para stakeholder mengenai capaian, hambatan, serta prospek yang dihadapi OPD.

Selanjutnya, kami juga mengajak semua pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan temuan dan rekomendasi yang terdapat dalam LAKIP ini. Dengan demikian, kami yakin bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman akan semakin mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas.

Terakhir, kami berharap agar LAKIP ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kinerja OPD. Semoga upaya kita bersama akan terus menghasilkan perubahan positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah kata pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Parit Malintang, 30 Maret 2026  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**Hendri S.Sos**  
Pembina Utama Muda,

## DAFTAR ISI

|                                                          | HAL |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar.....                                      | i   |
| Daftar isi .....                                         | ii  |
| <br>BAB.I PENDAHULUAN .....                              | 1   |
| A. Gambaran Umum .....                                   | 1   |
| B. Permasalahan Utama .....                              | 5   |
| C. Sistematika Laporan .....                             | 6   |
| <br>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                      | 9   |
| A. Rencana Strategis .....                               | 9   |
| B. Rencana Kerja Tahunan .....                           | 11  |
| C. Perjanjian Kinerja .....                              | 12  |
| <br>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                  | 18  |
| A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ..... | 18  |
| B. Inovasi .....                                         | 111 |
| C. Realisasi Anggaran .....                              | 124 |
| <br>BAB IV PENUTUP .....                                 | 129 |
| A. Kesimpulan.....                                       | 129 |
| B. Langkah ke depan .....                                | 129 |
| <br>LAMPIRAN.....                                        | 131 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen ini terdapat gambaran menyeluruh tentang kinerja dan pencapaian Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam menjalankan amanah pelayanan publik kepada masyarakat. Informasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman ikut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan terutama di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

LAKIP ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

---

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengampu 2 (dua) urusan, yaitu urusan pendidikan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan kebudayaan yang merupakan urusan pilihan yang artinya merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan sehingga daerah memiliki otonomi untuk mengelola kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Meskipun tidak termasuk dalam urusan wajib, urusan kebudayaan sering kali dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan daerah dan pemeliharaan identitas budaya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mengembangkan kebudayaan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

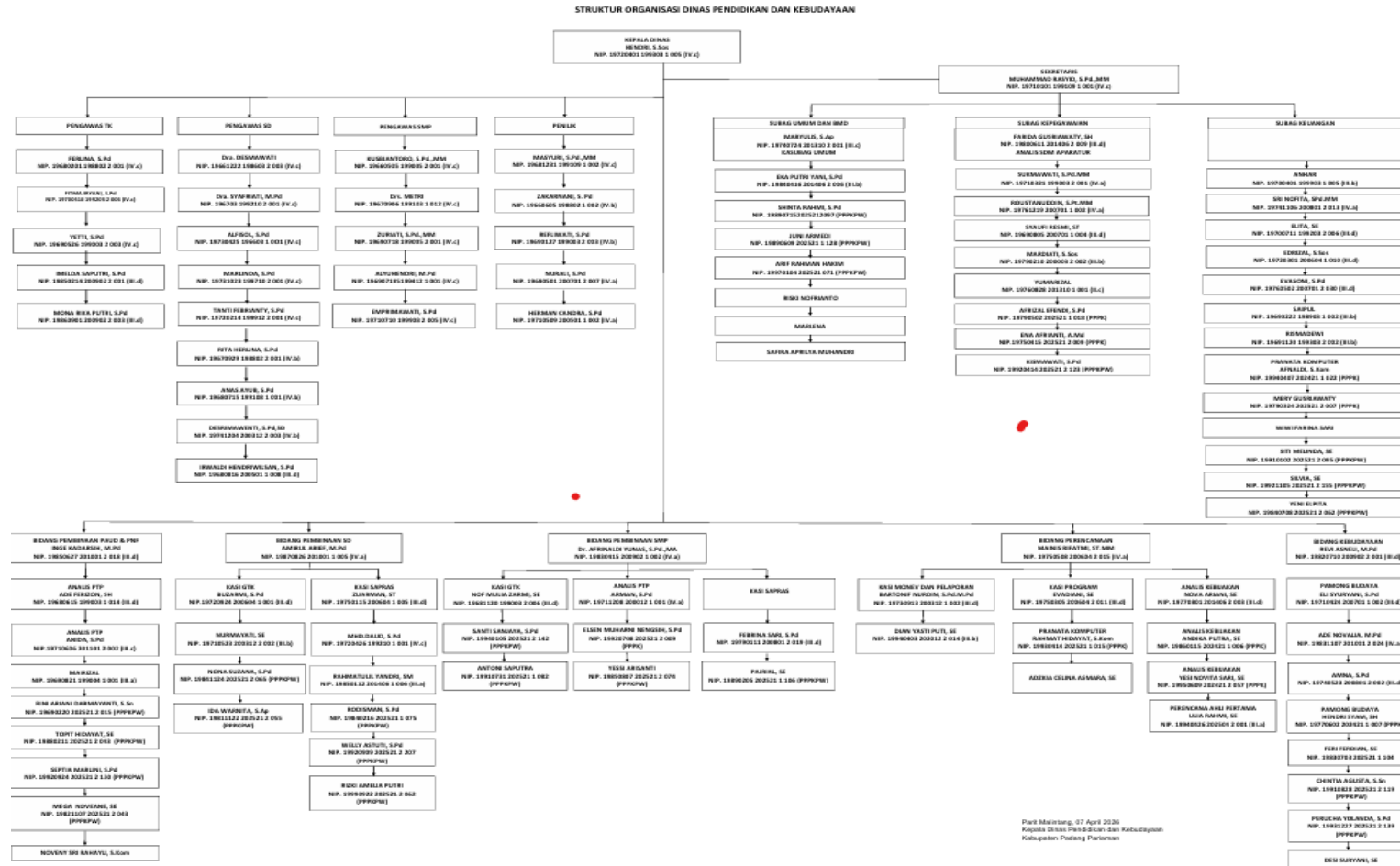
---

*Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025*

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari dinas ini adalah melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja yang berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 4693/Disdik/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026.

1. Struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Parit Malintang, 07 April 2020  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Padang Pariaman

HENDSI, S. Sca  
NIP. 19720401 19933 1 005

## 2. Ringkasan SKPD Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan dan Susunan Personilnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas.
  - 2) Perumusan kebijakan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - 3) Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
  - 4) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5) Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - 6) Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - 7) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
  - 8) Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
  - 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 1.1**

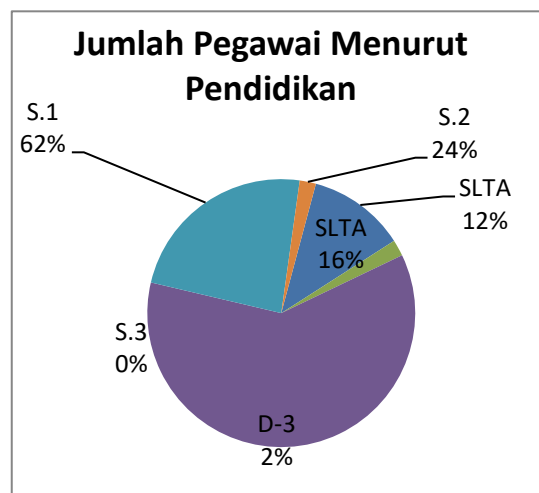
### **Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan**

| No.    | Jumlah Pegawai Menurut (orang) |    |            |    | Eselonering (orang) |    | Ket. |
|--------|--------------------------------|----|------------|----|---------------------|----|------|
|        | Golongan                       |    | Pendidikan |    |                     |    |      |
| 1      | II                             | 4  | SLTA       | 13 | II                  | 1  |      |
| 2      | III                            | 35 | D-2        | -  | III                 | 6  |      |
| 3      | IV                             | 11 | D-3        | 1  | IV                  | 5  |      |
| 4      |                                |    | S.1        | 49 | Fungsional          | 13 |      |
| 5      |                                |    | S.2        | 12 |                     |    |      |
| 6      |                                |    | S.3        | 1  |                     |    |      |
| Jumlah |                                | 50 | 76         |    |                     |    |      |

Sumber : Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

**Gambar 1.1**

### **Diagram Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Pendidikan**



Sumber : Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

## B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis diantaranya :

1. Pemerataan akses Pendidikan
  - a. Menambah Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah/Madrasah Baru
  - b. Memperbaiki, rehabilitasi dan merevitalisasi fasilitas pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Prasekolah.
  - c. Melaksanakan penjangkaran anak usia sekolah baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah untuk masuk kedalam sistem pendidikan.non formal
  - d. Melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada diluar sistem sekolah, baik yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender.
2. Peningkatan mutu pendidik
  - a. Meningkatkan persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi
  - b. Melakukan rekrutmen guru sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.
  - c. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru.
  - d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Manajemen Guru Mata Pelajaran
  - e. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah dan lembaga pendidikan lainnya

- f. Mengikuti program Sekolah Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak, Guru Penggerak
- 3. Peningkatan Mutu Peserta Didik
  - a. Menyediakan buku pelajaran pokok dan alat peraga belajar secara memadai
  - b. Melanjutkan program beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu
  - c. Menyediakan dana untuk lomba – lomba di tingkat Kabupaten.
  - d. Menyediakan dana untuk mengirim lomba tingkat propinsi, ini juga tidak terlaksana
- 4. Meningkatkan mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan.
  - a. Menyediakan Dana Operasional Sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
  - b. Melakukan penambahan fasilitas fungsional seperti ruang perpustakaan, ruang olahraga, ruang laboratorium dan pusat sumber belajar yang dilengkapi dengan sarana / peralatan pendukungnya.
  - c. Menyediakan dana Operasional Sekolah untuk mendukung proses Pembelajaran yang berkualitas.
  - d. Memperluas dan memantapkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Masyarakat (MBS) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - e. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Prasekolah

### C. SISTEMATIKA PELAPORAN

---

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

|          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I    | Pendahuluan                                                                                                                                                                                     |
|          | Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, menguraikan Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistematika Pelaporan |
| Bab II   | Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 mulai dari Kepala Dinas dengan Bupati sampai ke Perjanjian Kinerja Staf dengan atasannya           |
| Bab III. | Akuntabilitas Kinerja <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>                                                                      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Menyajikan capaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;</li> <li>2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;</li> <li>3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);</li> <li>5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;</li> <li>6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;</li> <li>7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;</li> </ol> <p>B. Realisasi Anggaran</p> <p>Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p> |
| Bab IV | <p>Penutup</p> <p>Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerjanya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja.
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029 Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021- 2026 dan Renstra 2025-2029 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 dan merupakan tahun pertama periode renstra tahun 2025-2029. Untuk mencapai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025, Dan menetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target-target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2025.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah dokumen yang menguraikan tujuan, dan strategi jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Pada renstra 2021-2026 Adapun visi daerah yang akan dicapai adalah **"Kabupaten Padang Pariaman Berjaya"** Ini adalah panduan yang merinci langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pencapaian pada misi ke 1, 4, dan 5 daerah tahun 2021-2026 yaitu :

- Misi ke-1 : Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradab dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan
- Misi ke-4 : Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan
- Misi ke-5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan

Sementara itu, Pada renstra 2025-2029 Adapun visi daerah yang akan dicapai adalah **" Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"** Ini adalah panduan yang merinci langkah-langkah yang akan diambil

oleh organisasi dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pencapaian pada misi ke 1, 2, dan 5 daerah tahun 2025-2029 yaitu :

- Misi ke-1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegrasi
- Misi ke-2: Menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
- Misi ke-5 :Mewujudkan kehidupan sosial yang religius,harmonis dan berbudaya

Hubungan antara visi,misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Hubungan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| VISI : Padang Pariaman Berjaya (unggul BERkelanjutan, Religius, seJAhtera dan berbudaYA)                                                                                            |                                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                                                                                                | TUJUAN                                                     | SASARAN                                             |
| Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Terampil Serta Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakkan Sektor Pendidikan Non Formal | Peningkatan mutu pendidikan                                | Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan          |
| Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban                   | Terwujudnya Peningkatan kualitas kehidupan berbudaya       | meningkatnya perlindungan warisan budaya.           |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan       | Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah |

**Table 2.2**  
**Hubungan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| VISI : Padang Pariaman Maju Dan Sejahtera                                |                                                                                 |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                     | TUJUAN                                                                          | SASARAN                                                                       |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Berintegrasi    | Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas | Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| Menciptakan Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatnya Intelektualitas Dan Karakter Anak Usia Sekolah                     | Meningkatnya Standar Dan Mutu Pendidikan                                      |

|                                                                    |                                                   |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                   | Meningkatnya Akses Dan Pamarataan Pendidikan                                                       |
| Mewujud Kan Kehidupan Sosial Yang Religius, Harmonis Dan Berbudaya | Meningkatnya Pelestarian Cagar Dan Warisan Budaya | Meningkatnya Kualitas Inventarisasi Pelestarian Warisan Budaya Benda Dan Objek Diduga Cagar Budaya |
|                                                                    |                                                   | Meningkatnya Peran Masyarakat Untuk Memajukan Kebudayaan Dalam Pengembangan pariwisata.            |

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Padang Pariaman tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 termasuk untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan renstra periode 2021-2025 didukung oleh 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Sementara itu IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan renstra periode 2025-2029 didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis dengan 16 (Enam Belas) indikator kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target. Periode renstra 2021-2026**

| No | Sasaran                                             | Indikator Sasaran                                                              | Satuan | Target |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan          | Angka partisipasi murni (APM) SD                                               | angka  | 100    |
|    |                                                     | Angka partisipasi murni (APM) SMP                                              | angka  | 85     |
|    |                                                     | Angka partisipasi kasar (APK) PAUD                                             | angka  | 62,3   |
|    |                                                     | Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | %      | 95     |
|    |                                                     | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4                                | %      | 98     |
| 2  | meningkatnya perlindungan warisan budaya .          | Persentase cagar budaya yang dilindungi                                        | %      | 90     |
|    |                                                     | Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi                            | %      | 100    |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat                                | %      | 80,05  |

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target. Periode renstra 2025-2029**

| No | Sasaran                                                                       | Indikator Sasaran                            | Satuan | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)          | Angka  | 77,7   |
| 2  | 1.Meningkatnya standar dan mutu Pendidikan                                    | Indeks SPM pendidikan (Indeks)               | Angka  | 72,50  |
|    | 2.Meningkatnya akses dan pemerataan Pendidikan                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD           | Angka  | 51,5   |
|    |                                                                               | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD             | Angka  | 119,3  |
|    |                                                                               | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP            | Angka  | 98,1   |
|    |                                                                               | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun | Angka  | 51,35  |
|    |                                                                               | Angka Partisipasi Murni (APM) SD             | Angka  | 91,68  |
|    |                                                                               | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP            | Angka  | 80,32  |
|    |                                                                               | Rasio Murid terhadap Guru PAUD               | Angka  | 11,558 |

|   |                                                                                                       |                                                                           |       |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   |                                                                                                       | Rasio Murid terhadap Guru SD                                              | Angka | 13     |
|   |                                                                                                       | Rasio Murid terhadap Guru SMP                                             | Angka | 14     |
|   |                                                                                                       | Persentase Anak tidak sekolah                                             | %     | 6,5    |
|   |                                                                                                       | Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD               | Angka | 0,0201 |
|   |                                                                                                       | Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD                   | Angka | 0,0098 |
|   |                                                                                                       | Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP                 | Angka | 0,0028 |
| 3 | 1. Meningkatnya kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan objek diduga cagar budaya | Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya     | %     | 66 %   |
| 4 | 2. Meningkatnya peran masyarakat Untuk memajukan kebudayaan dalam pengembangan Pariwisata             | Persentase keterlibatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | %     | 1,2    |

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. \*Untuk Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

## 1. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

| PERJANJIAN AWAL TAHUN 2025<br>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN<br>KABUPATEN PADANG PARIAMAN |                                                     |                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| No                                                                                         | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                              | Target |
| (1)                                                                                        | (2)                                                 | (3)                                                                            | (4)    |
| 1.                                                                                         | Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan          | Angka Partisipasi Murni (APM) SD                                               | 100    |
|                                                                                            |                                                     | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                              | 85     |
|                                                                                            |                                                     | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                                             | 62,3   |
|                                                                                            |                                                     | Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi standar pendidikan | 95%    |
|                                                                                            |                                                     | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV                               | 98%    |
| 2                                                                                          | Meningkatnya perlindungan warisan budaya            | Persentase cagar budaya yang dilindungi                                        | 90%    |
|                                                                                            |                                                     | Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi                            | 100%   |
| 3                                                                                          | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat                                | 80,05  |

Indikator kinerja yang tertuang pada PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 terdapat 3 (TIGA) sasaran dan 5 (lima) indikator. Indikator yang berkaitan dengan urusan pendidikan yaitu (APM SD, APM SMP, APK PAUD, Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi standar pendidikan, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV) dan 2 indikator urusan kebudayaan sebanyak 2 indikator (persentase cagar budaya yang dilindungi dan persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi) serta 1 indikator terkait urusan penunjang yaitu Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat.

## 2. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Indikator kinerja yang tertuang pada PK perubahan disdikbud tahun 2025 berdasarkan RPJMD periode 2025-2029 terdapat 13 indikator berkaitan dengan urusan pendidikan (indek SPM, APK PAUD, APK SD, APK SMP, APM PAUD, APM SMP, Rasio guru PAUD, Rasio guru SD, Rasio guru SMP, persentase penurunan ATS, Rasio Sekolah SD, Rasio Sekolah SMP) dan 2 indikator kebudayaan (persentase inventarisasi warisan budaya dan persentase keterlibat masyarakat dalam kebudayaan) serta indikator penunjang yaitu nilai sakip perangkat daerah.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

| No  | Sasaran Strategis                                                                                  | Indikator Kinerja                                                         | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                | (3)                                                                       | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                    | Nilai AKIP perangkat daerah                                               | 77,7   |
| 2.  | Meningkatnya standar dan mutu pendidikan                                                           | Indeks SPM Pendidikan                                                     | 72,50  |
| 3.  | Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan                                                       | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                                        | 51,55  |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                          | 119,3  |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                         | 98,1   |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun                              | 51,35  |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Murni (APM) SD                                          | 91,68  |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                         | 80,32  |
|     |                                                                                                    | Rasio Murid terhadap Guru PAUD                                            | 11,558 |
|     |                                                                                                    | Rasio Murid terhadap Guru SD                                              | 13     |
|     |                                                                                                    | Rasio Murid terhadap Guru SMP                                             | 14     |
|     |                                                                                                    | Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS)                                       | 6,5    |
|     |                                                                                                    | Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD               | 0,0201 |
|     |                                                                                                    | Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD                   | 0,0098 |
|     |                                                                                                    | Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP                 | 0,0028 |
| 4   | Meningkatnya kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan objek diduga cagar budaya | Persentase Inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya     | 66 %   |
| 5   | Meningkatnya peran masyarakat untuk memajukan kebudayaan dalam pengembangan pariwisata             | Persentase keterlibatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | 1,2    |

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dan PK perubahan tahun 2025 terdapat 3 indikator yang sama yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD, APM SMP dan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD .

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan..

#### A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi Target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara keputusan kepala LAN dan Peraturan Menteri dalam Negeri dimaksud dengan pengukuran dengan skala Ordinal yaitu :

| Skala Ordinal (%)   | Predikat / Kategori |
|---------------------|---------------------|
| >100                | Sangat Berhasil     |
| $90 < s.d \leq 100$ | Berhasil            |
| $80 < s.d \leq 90$  | Cukup Berhasil      |
| $70 < s.d \leq 80$  | Kurang Berhasil     |
| $\leq 70$           | Tidak Berhasil      |

- **Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2025 :**

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

| No                                                                                                                                                                                          | Tujuan                      | Indikator Tujuan                                | Sasaran                                    | Indikator Sasaran                                                              | Rumus Penghitungan                                                                                                      | Satuan | Kinerja 2025 |           | %        | Predikat       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                             |                             |                                                 |                                            |                                                                                |                                                                                                                         |        | Target       | Realisasi |          |                |  |
| Misi 4 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Terampil Serta Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakan Sektor Pendidikan Non Formal |                             |                                                 |                                            |                                                                                |                                                                                                                         |        |              |           |          |                |  |
| 1                                                                                                                                                                                           | Peningkatan mutu pendidikan | Rata - Rata Lama Sekolah                        | Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan | Angka partisipasi murni (APM) SD                                               | Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun x 100   | Angka  | 100          | 96,89     | 96,89    | Berhasil       |  |
|                                                                                                                                                                                             |                             |                                                 |                                            | Angka partisipasi murni (APM) SMP                                              | Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun x 100 | Angka  | 85           | 82,13     | 96,62    | Berhasil       |  |
|                                                                                                                                                                                             |                             |                                                 |                                            | Angka partisipasi kasar (APK) PAUD                                             | Total siswa tiap jenjang pendidikan sederajat: penduduk usia sekolah di jenjang tersebut x 100                          | Angka  | 62.3         | 40        | 64,20    | Tidak Berhasil |  |
|                                                                                                                                                                                             |                             | Harapan Lama Sekolah                            |                                            | Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik / total satuan Pendidikan x 100                                    | %      | 95           | 36        | 37,89    | Tidak Berhasil |  |
|                                                                                                                                                                                             |                             | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 |                                            | Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 / Jmlah total seluruh guru x 100          | %                                                                                                                       | 98     | 93           | 94,89     | Berhasil |                |  |

| MISI 1: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban              |                                                            |                                                                                                         |                                                     |                                                     |                                                                                                    |          |       |       |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|-----------------|
| 2                                                                                                                                                                                      | Terwujudnya Peningkatan kualitas kehidupan berbudaya       | Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | meningkatnya perlindungan warisan budaya .          | Persentase cagar budaya yang dilindungi             | Jumkah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi) / jumlah cagar budaya yang terdata x 100    | %        | 90    | 100   | 111,11 | Sangat Berhasil |
|                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                         |                                                     | Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi | Jumlah warisan budaya tak benda yang dilindungi/ jumlah total warisan budaya yang ditetapkan x 100 | %        | 100   | 100   | 100    | Berhasil        |
| Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan |                                                            |                                                                                                         |                                                     |                                                     |                                                                                                    |          |       |       |        |                 |
| 3                                                                                                                                                                                      | Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan akuntable | Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                              | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat     | Nilai SAKIP dari Inspektorat                                                                       | Predikat | 80,05 | 77,70 | 97,06  | Berhasil        |

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

| No                                                                                | Tujuan                                                                          | Indikator Tujuan                      | Sasaran                                                                       | Indikator Sasaran                   | Satuan | Kinerja 2025 |           | %   | Predikat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----|----------|
|                                                                                   |                                                                                 |                                       |                                                                               |                                     |        | Target       | Realisasi |     |          |
| Misi 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS   |                                                                                 |                                       |                                                                               |                                     |        |              |           |     |          |
| 1                                                                                 | Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Nilai) | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) | Angka  | 77,7         | 77,70     | 100 | Berhasil |
| Misi 2 : MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING |                                                                                 |                                       |                                                                               |                                     |        |              |           |     |          |

|   |                                                             |                                |                                                |                                              |       |        |        |        |                 |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya Intelektualitas dan karakter Anak Usia sekolah | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 1.Meningkatnya standar dan mutu Pendidikan     | Indeks SPM pendidikan (Indeks)               | Angka | 72,50  | 72,20  | 99,58  | Berhasil        |
|   |                                                             | Harapan Lama Sekolah (Tahun)   | 2.Meningkatnya akses dan pamarataan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD           | Angka | 51,55  | 40     | 77,59  | Kurang Berhasil |
|   |                                                             | Literasi SD/Sederajat (Nilai)  |                                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD             | Angka | 119,3  | 105,69 | 88,59  | Cukup Berhasil  |
|   |                                                             | Literasi SMP/Sederajat (Nilai) |                                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP            | Angka | 98,1   | 95,71  | 97,56  | Berhasil        |
|   |                                                             |                                |                                                | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun | Angka | 51,35  | 39,3   | 76,53  | Cukup Berhasil  |
|   |                                                             |                                |                                                | Angka Partisipasi Murni (APM) SD             | Angka | 91,68  | 96,89  | 105,68 | Sangat Berhasil |
|   |                                                             |                                |                                                | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP            | Angka | 80,32  | 82,13  | 102,25 | Sangat Berhasil |
|   |                                                             |                                |                                                | Rasio Murid terhadap Guru PAUD               | Angka | 11,558 | 11,16  | 96,56  | Berhasil        |
|   |                                                             |                                |                                                | Rasio Murid terhadap Guru SD                 | Angka | 13     | 12,38  | 95,23  | Berhasil        |
|   |                                                             |                                |                                                | Rasio Murid terhadap Guru SMP                | Angka | 14     | 13,37  | 95,5   | Berhasil        |
|   |                                                             |                                |                                                | Persentase anak tidak sekolah                | %     | 6,5    | 7,17   | 89,69  | Cukup Berhasil  |

|                                                                                   |                                                   |                                                       |                                                                                                       |                                                                           |       |        |        |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|----------------|
|                                                                                   |                                                   |                                                       |                                                                                                       | Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD               | Angka | 0,0201 | 0,0193 | 96,01 | Berhasil       |
|                                                                                   |                                                   |                                                       |                                                                                                       | Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD                   | Angka | 0,0098 | 0,0088 | 89,79 | Cukup Berhasil |
|                                                                                   |                                                   |                                                       |                                                                                                       | Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP                 | Angka | 0,0028 | 0,0024 | 85,71 | Cukup Berhasil |
| <b>MISI 5. MEWUJUD KAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG RELIGIUS, HARMONIS DAN BERBUDAYA</b> |                                                   |                                                       |                                                                                                       |                                                                           |       |        |        |       |                |
| 1                                                                                 | Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan             | 1. Meningkatnya kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan objek diduga cagar budaya | Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya     | %     | 66     | 57,14  | 86,57 | Cukup Berhasil |
|                                                                                   |                                                   | Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan | 2. Meningkatnya peran masyarakat Untuk memajukan kebudayaan dalam pengembangan Pariwisata             | Persentase keterlibatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | %     | 1,2%   | 1,09   | 90,83 | Berhasil       |

## I. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA AWAL

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Tabel 3.3**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan**

| No | Sasaran                                    | Indikator Kinerja                                                              | Target | Realisasi | %     | Predikat        |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------|
| 1  | Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan | Angka partisipasi murni (APM) SD                                               | 100    | 96,89     | 96.89 | Berhasil        |
| 2  |                                            | Angka partisipasi murni (APM) SMP                                              | 85     | 82,13     | 96.62 | Sangat Berhasil |
| 3  |                                            | Angka partisipasi kasar (APK) PAUD                                             | 62.3   | 40        | 64.20 | Tidak Berhasil  |
| 4  |                                            | Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | 95     | 71.50     | 75.26 | Kurang Berhasil |
| 5  |                                            | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4                                | 98     | 93        | 94.89 | Cukup Berhasil  |

Keterangan tentang keberhasilan, cukup berhasil dan kurang berhasilnya yang dapat dicapai pada sasaran tersebut diatas dijelaskan dalam narasi berikut:

### 1. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD

Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah indikator pendidikan yang menunjukkan persentase anak usia sekolah dasar yang bersekolah tepat pada jenjang SD/ sederajat dibandingkan dengan seluruh penduduk pada kelompok usia SD.

**Rumus Penghitungan : Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun**

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama          | Satuan | Tahun 2025 |           |                    | Interpretasi |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|--------------|
|                                  |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja(%) |              |
| Angka partisipasi murni (APM) SD | %      | 100        | 96,89     | 96.89              | Berhasil     |

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang Pendidikan dengan usia yang sesuai dan dinyatakan dalam angka. Capaian APM SD/MI/Paket A tahun 2025 adalah 96.89 dari target 100 sehingga capaian kinerja ini adalah sebesar 97% dengan predikat berhasil. Namun, walaupun demikian, masih terdapat selisih usia 7-12 tahun yang tidak sekolah dan atau tidak tamat sekolah SD/MI/Paket A.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah memperoleh akses pendidikan sesuai jenjang usianya. Meskipun target 100% belum sepenuhnya tercapai, hasil ini mencerminkan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dasar. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi sekolah melalui pemerataan akses pendidikan, penanganan anak yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar seluruh anak usia sekolah dasar dapat mengakses pendidikan secara optimal.

**b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama          | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                  |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Angka partisipasi murni (APM) SD | %      | 100        | 99,5      | 99,50               | 100        | 96,89     | 96.89               | Berhasil     |

dari tabel diatas dapat dilihat terjadi penurunan capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD dari tahun 2024 ke tahun 2025. selisih capaian APM SD tersebut sebesar

2.61. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada pada kategori berhasil, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar tetap memperoleh layanan pendidikan sesuai usia. Penurunan capaian ini dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan upaya pemerataan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, serta mendorong anak usia sekolah yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan dasar.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 3.6

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2021 sampai 2025

| Indikator Kinerja Utama          | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |       |       |      |       |
|----------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------|-------|
|                                  |        | 2021         | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2021              | 2022  | 2023  | 2024 | 2025  |
| Angka partisipasi murni (APM) SD | %      | 94.67        | 94.77 | 94.86 | 94.96 | 95.05 | 98,99             | 99,26 | 99,15 | 99,5 | 96,89 |

Dari table diatas dapat dilihat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai 2025. Pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi penurunan capaian APM SD sebesar 0.11 poin sementara itu pada tahun 2023 sampai 2024 terjadi peningkatan capaian APM SD sebesar 0,35 poin. Sedangkan dari tahun 2024 sampai tahun 2025 terjadi Kembali penurunan capaian sebesar 2.61.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.190.908.240,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 44.603.040.879,- atau sekitar 99%.

Foto 3.1

Proses belajar dan mengajar di Satuan Pendidikan SD Pasca bencana



**e. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 97% dengan predikat berhasil. Namun, walaupun demikian, masih terdapat selisih usia 7-12 tahun yang tidak sekolah dan atau tidak tamat sekolah SD/MI/Paket A. Keberhasilan capaian APM SD ini dikarenakan beberapa faktor pendukung, diantaranya:

1. Ketepatan usia peserta didik dalam memperoleh Pendidikan usia 7 pada awal memasuki jenjang Pendidikan SD.
2. Adanya peningkatan akses Pendidikan yang dapat mendukung warga usia sekolah dapat memperoleh Pendidikan dengan akses dan jarak yang tidak terlalu jauh serta sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung proses pembelajaran.
3. Adanya inovasi dari satuan Pendidikan dengan memberikan program unggulan seperti tahfiz dan Pendidikan berbasis islami yang memberikan nilai tambah dalam Pendidikan dasar.
4. Ada nya bantuan pembiayaan Pendidikan dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh peserta didik sekolah dasar.

5. Adanya bantuan pembiayaan yang diperuntukan kepada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui program ini diharapkan dapat mencegah terjadinya putus sekolah dan dapat memastikan siswa yang kurang mampu dapat terus memperoleh Pendidikan.
6. Adanya pemahaman dan Kesadaran akan pentingnya Pendidikan Dasar oleh orang tua siswa sehingga dapat mendorong dan mendukung anaknya agar dapat memperoleh pendidikan.

Sementara untuk faktor penghambat capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi peserta didik. Siswa yang berasal dari kondisi ekonomi kurang mampu cenderung beresiko putus sekolah karena Kemiskinan menyebabkan orang tua kesulitan memenuhi biaya pendidikan, meskipun sekolah dasar pada dasarnya gratis. Selain itu Biaya tidak langsung seperti seragam, buku, transportasi, dan uang saku masih menjadi beban.
2. Akses dan infrastruktur sekolah yang belum merata seperti Jarak sekolah yang jauh dari permukiman, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu Kondisi jalan dan transportasi yang kurang memadai sehingga minat sekolah siswa berkurang.
3. Faktor kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan dimana kondisi sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai serta kekurangan guru sehingga meningkatkan resiko ketidakhadiran dan putus sekolah.
4. Banyaknya peserta didik usia sekolah yang menempuh pendidikan nonformal yang tidak terdata di sistem pendidikan yang berada dibawah naungan kementerian pendidikan dan Kementerian Agama (DAPODIK atau EMS) seperti sekolah berbasis keagamaan.

Selanjutnya yang menjadi upaya untuk perbaikan kinerja pelayanan ini adalah :

1. Adanya regulasi mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengatur anak usia Pendidikan yang memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD) pada usia 7 tahun.
2. Memastikan untuk peserta didik di jenjang SD agar dapat menyelesaikan Pendidikan saat berumur 12 tahun.
3. Pemerataan Akses Pendidikan dengan memastikan kondisi akses jalan yang bagus dan satuan pendidikan yang tidak terlalu jauh domisili peserta didik.

4. Meningkatkan mutu Pendidikan dengan pemenuhan 8 Standar pendidikan agar menghasilkan Pendidikan yang berkualitas sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang memilih bersekolah ke daerah lain dengan asumsi bahwa Pendidikan di daerah lain lebih bermutu
5. Melakukan intervensi dan memberikan atensi kepada peserta didik yang kurang mampu dengan memberikan kesempatan mendapatkan akses bantuan Pendidikan dari pemerintah pusat berupa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) maupun bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah berupa BOSDA.
6. Memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap orang tua mengenai pentingnya Pendidikan
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan melalui pengawas sekolah.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2025

| Sasaran                                    | Indikator Kinerja                | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | 96.89           | 99                  | -2.11             |

Efisiensi capaian kinerja =  $96.89\% - 100\% = -3.11\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 99\% = 1\%$

Total Efisiensi =  $-3.11\% + 1\% = -2.11\%$

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 1% dan efisiensi kinerja sebesar -3.11%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -2.11%,. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD 'Kurang Baik'.

## 2. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah indikator pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia SMP yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat dibandingkan dengan seluruh penduduk pada kelompok usia SMP.

Rumus Penghitungan : Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.8

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama           | Satuan | Tahun 2025 |           |                    | Interpretasi |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|--------------|
|                                   |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja(%) |              |
| Angka partisipasi murni (APM) SMP | %      | 85         | 82.13     | 96.62              | Berhasil     |

Capaian APM SMP tahun 2025 adalah 82,13 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85 sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,62% dengan predikat Berhasil. Namun, walaupun demikian, masih terdapat selisih usia 13-15 tahun yang tidak sekolah dan atau tidak tamat sekolah SMP sederajat.

Meskipun target belum tercapai secara penuh, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia SMP telah memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usianya. Selisih sebesar 2,87 poin persentase antara target dan realisasi mengindikasikan masih terdapat anak usia 13–15 tahun yang belum bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kendala sosial ekonomi, akses terhadap layanan pendidikan, perpindahan penduduk, maupun risiko putus sekolah.

### b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.9

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama          | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi   |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
|                                  |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                |
| Angka partisipasi murni (APM) SM | %      | 80         | 82,13     | 102,66              | 85         | 82,13     | 96.62               | Cukup berhasil |

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator APM SMP tahun 2024 dan 2025 tidak mengalami penurunan atau kenaikan sehingga nilai capaiannya menjadi 82.13. Secara keseluruhan, realisasi APM SM berhasil dipertahankan pada angka 82,13% selama dua tahun berturut-turut, yang menunjukkan stabilitas partisipasi penduduk usia sekolah menengah dalam mengakses pendidikan sesuai jenjangnya. Namun demikian, peningkatan target pada tahun 2025 belum dapat diimbangi dengan peningkatan realisasi.

Hal ini menunjukkan masih diperlukan berbagai upaya untuk memperluas akses pendidikan menengah, antara lain melalui penguatan program pencegahan putus sekolah, penanganan anak tidak sekolah, pemberian dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian APM SMP dapat meningkat sehingga target yang ditetapkan pada tahun-tahun mendatang dapat tercapai secara optimal.

### c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.9

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2021 sampai 2025

| Indikator Kinerja Utama           | Satuan | Target RPJMD |       |      |      |      | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|-----------------------------------|--------|--------------|-------|------|------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |        | 2021         | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2021              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Angka partisipasi murni (APM) SMP | %      | 60.90        | 63.50 | 66.2 | 69   | 71.9 | 77.18             | 77.27 | 78.22 | 82.13 | 82.13 |

Dari table diatas dapat dilihat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai 2025. Dari tahun 2021 terjadi peningkatan capaian indikator APM SMP di setiap tahunnya. Namun demikian masih terdapat selisih sebesar 17,87 anak usia sekolah 13-15 tahun yang tidak bersekolah tepat usia.

Secara keseluruhan, perkembangan APM SMP selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang positif. Realisasi meningkat dari 77,18% pada tahun 2021 menjadi 82,13% pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sebesar 4,95 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat terus membaik dan mampu melampaui target pembangunan yang telah ditetapkan dalam renstra disdikbud tahun 2021-2026.

Meskipun demikian, realisasi pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang stagnan dibandingkan tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi sekolah mulai menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah, risiko putus sekolah, faktor sosial ekonomi keluarga, serta keterbatasan akses di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah melalui penguatan program penanganan Anak

Tidak Sekolah (ATS), pencegahan putus sekolah, perluasan akses pendidikan yang inklusif, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar capaian APM SMP dapat terus meningkat pada periode pembangunan berikutnya.

d. **Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- e. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- f. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- g. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- h. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.778.824.098,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 18.589.147.098,00,- atau sekitar 89%

Foto 3.2

Ket : Pelaksanaan Ujian Assessment tingkat SMP



**e. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang Pendidikan dengan usia yang sesuai dan dinyatakan dalam angka. Capaian APM SMP tahun 2025 adalah 82,13 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85.

- Faktor yang mendukung keberhasilan capaian :
  1. Ketepatan usia peserta didik dalam memperoleh Pendidikan usia 12 pada awal memasuki jenjang Pendidikan SMP.
  2. Adanya peningkatan akses Pendidikan yang dapat mendukung warga usia sekolah dapat memperoleh Pendidikan dengan akses dan jarak yang tidak terlalu jauh serta sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung proses pembelajaran.
  3. Adanya inovasi dari satuan Pendidikan dengan memberikan program unggulan seperti tahfiz dan Pendidikan berbasis islami yang memberikan nilai tambah dalam Pendidikan dasar.
  4. Ada nya bantuan pembiayaan Pendidikan dari pemerintan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh peserta didik sekolah Menengah Pertama.
  5. Adanya bantuan pembiayaan yang diperuntukan kepada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui program ini diharapkan dapat mencegah terjadinya putus sekolah dan dapat memastikan siswa yang kurang mampu dapat terus memperoleh Pendidikan.
  6. Ada nya pemahaman dan Kesadaran akan pentingnya Pendidikan Menengah pertama oleh orang tua siswa sehingga dapat mendorong dan mendukung anaknya agar dapat memperoleh pendidikan.

Sementara untuk faktor penghambat capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi peserta didik. Siswa yang berasal dari kondisi ekonomi kurang mampu cenderung beresiko putus sekolah karena Kemiskinan menyebabkan orang tua kesulitan memenuhi biaya pendidikan, meskipun sekolah dasar pada dasarnya gratis. Selain itu Biaya tidak langsung seperti seragam, buku, transportasi, dan uang saku masih menjadi beban.

2. Akses dan infrastruktur sekolah yang belum merata seperti Jarak sekolah yang jauh dari permukiman, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. selain itu Kondisi jalan dan transportasi yang kurang memadai sehingga minat sekolah siswa berkurang.
3. Faktor sosial dan budaya juga menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi peserta didik. Sebagian siswa putus bersekolah karena budaya yang lebih mengutamakan anak bekerja membantu keluarga dibandingkan bersekolah. Selain itu Praktik perkawinan usia dini juga masih terjadi di beberapa daerah sehingga kesempatan peserta didik memperoleh pendidikan tidak optimal.
4. Faktor kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan dimana kondisi sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai serta kekurangan guru sehingga meningkatkan resiko ketidakhadiran dan putus sekolah.

Selanjutnya yang menjadi upaya untuk perbaikan kinerja pelayanan ini adalah :

- 1) Adanya regulasi mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengatur anak usia Pendidikan yang memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada usia 12 tahun.
- 2) Memastikan untuk peserta didik di jenjang SMP agar dapat menyelesaikan Pendidikan saat berumur 15 tahun.
- 3) Pemerataan Akses Pendidikan dengan memastikan kondisi akses jalan yang bagus dan satuan pendidikan yang tidak terlalu jauh domisili peserta didik.
- 4) Meningkatkan mutu Pendidikan dengan pemenuhan 8 Standar pendidikan agar menghasilkan Pendidikan yang berkualitas sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang memilih bersekolah ke daerah lain dengan asumsi bahwa Pendidikan di daerah lain lebih bermutu
- 5) Melakukan intervensi dan memberikan atensi kepada peserta didik yang kurang mampu dengan memberikan kesempatan mendapatkan akses bantuan Pendidikan dari pemerintah pusat berupa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) maupun bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah berupa BOSDA.
- 6) Memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap orang tua mengenai pentingnya Pendidikan
- 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan melalui pengawas sekolah.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2025

| Sasaran                                    | Indikator Kinerja                 | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 96.62           | 89                  | 7,62              |

Efisiensi capaian kinerja =  $96.62\% - 100\% = -3,38\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 89\% = 11\%$

Total Efisiensi =  $-3,38 + 11\% = 7,62\%$

Efisiensi kinerja sebesar -3,38% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 11% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 7,62%,. Angka positif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP berjalan Baik.

### 3. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAUD

APK PAUD menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik yang terdaftar di lembaga PAUD dengan jumlah penduduk usia sasaran PAUD yang dinyatakan dalam persentase. APK PAUD menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan karena mencerminkan sejauh mana layanan PAUD dapat menjangkau masyarakat. Nilai APK yang tinggi menunjukkan bahwa kesempatan mengikuti pendidikan anak usia dini semakin terbuka, termasuk bagi anak yang berada di luar rentang usia ideal maupun yang mengikuti layanan PAUD lebih awal atau lebih lambat dari usia yang seharusnya.

Rumus Penghitungan : Jumlah murid yang mengikuti PAUD dibagi dengan jumlah anak umur 3-6 tahun

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.11

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama            | Satuan | Tahun 2025 |           |                    | Interpretasi   |
|------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|----------------|
|                                    |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja(%) |                |
| Angka partisipasi kasar (APK) PAUD | %      | 62,3       | 40        | 64,20              | Tidak Berhasil |

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD). Capaian APK PAUD tahun 2025 adalah 40 lebih rendah 22,3 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 62,3. sehingga berpredikat tidak berhasil. Capaian yang masih rendah ini disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu rendah kesadaran orang tua siswa akan pentingnya Pendidikan PAUD dan masih belum merata nya keberadaan satuan PAUD di daerah khususnya di Tingkat Korong.

**b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Tabel 3.12

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi kasar (APK) PAUD Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama            | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi   |
|------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
|                                    |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                |
| Angka partisipasi kasar (APK) PAUD | %      | 65         | 39,33     | 60,50               | 62,3       | 40        | 64,20               | Tidak berhasil |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator APK PAUD tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,67 sehingga nilai capaiannya menjadi 40. Pada tahun 2024, target APK PAUD ditetapkan sebesar 65%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 39,33%, sehingga capaian kinerja mencapai 60,50%. Selanjutnya pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 62,30% dengan realisasi sebesar 40,00%, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 64,20%.

Meskipun capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,70 poin persentase dibandingkan tahun 2024, hasil tersebut masih berada dalam kategori tidak berhasil karena belum mencapai tingkat capaian yang diharapkan. Realisasi APK PAUD menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak dalam layanan pendidikan anak usia dini masih relatif rendah dibandingkan

target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan realisasi dari 39,33% menjadi 40,00%, namun peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk memenuhi sasaran kinerja.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Partisipasi kasar (APK) PAUD Tahun 2021 sampai 2025

| Indikator Kinerja Utama            | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |       |      |
|------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|-------|------|
|                                    |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021              | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 |
| Angka partisipasi kasar (APK) PAUD | %      | 52,5         | 54,8 | 57,2 | 59,7 | 62,3 | 56                | 52,6 | 61   | 39,33 | 40   |

Dari table diatas dapat dilihat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai 2025. Dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan capaian indikator APK PAUD di setiap tahunnya. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian yang cukup signifikan sebesar 21,67.

Pada tahun 2021, realisasi APK PAUD mencapai 56,00%, melampaui target sebesar 52,50% atau lebih tinggi 3,50 poin persentase. Pada tahun 2022, realisasi sebesar 52,60% masih berada di bawah target 54,80%, dengan selisih 2,20 poin persentase. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 61,00%, melampaui target 57,20% atau lebih tinggi 3,80 poin persentase, yang menunjukkan peningkatan akses layanan PAUD.

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana realisasi hanya mencapai 39,33%, jauh di bawah target 59,70% atau mengalami selisih 20,37 poin persentase. Pada tahun 2025, realisasi meningkat sedikit menjadi 40,00%, tetapi masih berada di bawah target 62,30% dengan selisih 22,30 poin persentase.

Secara keseluruhan, capaian APK PAUD selama periode Renstra menunjukkan bahwa kinerja belum konsisten. Meskipun pada awal periode terdapat capaian yang mampu melampaui target, penurunan yang terjadi pada dua tahun terakhir mengakibatkan target Renstra tahun 2025 belum dapat dicapai. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat partisipasi anak pada layanan PAUD.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.553.179.500,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 2.057.529.326,00 atau sekitar 93,57%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- d. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Gambar 3.3  
Pelaksanaan kegiatan gebyar PAUD



**e. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Persentase capaian kinerja APK PAUD adalah sebesar 64,2% berpredikat tidak berhasil dari target yang ditetapkan. Capaian yang masih rendah ini disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu:

- 1) Rendahnya kesadaran orang tua siswa akan pentingnya Pendidikan PAUD. Sebagian orang tua belum memahami bahwa PAUD berperan penting dalam mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, sosial, emosional, motorik, serta pembentukan karakter anak.

- 2) Belum meratanya keberadaan satuan PAUD serta belum memadainya sarana dan prasarana PAUD.
- 3) Belum optimalnya penerapan Kebijakan wajib PAUD sebelum SD.

Selanjutnya yang menjadi upaya untuk perbaikan kinerja pelayanan ini adalah :

- Adanya regulasi yang mengatur bahwa anak Pendidikan Sekolah Dasar di anjurkan mengikuti Pendidikan Anak usia dini (PAUD) terlebih dahulu.
- Satuan Pendidikan PAUD yang jumlahnya mengalami peningkatan sehingga mempermudah dalam mengaksesnya karena hampir di setiap Korong sudah terdapat satuan PAUD.
- Adanya bantuan pembiayaan kepada peserta didik PAUD berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukan dalam mendukung operasional kegiatan pembelajaran.
- Penguatan kelembagaan PAUD yang dilakukan melalui Dana Desa

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2025

| Sasaran                                    | Indikator Kinerja                  | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan | Angka partisipasi kasar (APK) PAUD | 64,20           | 93,57               | -29,37            |

Efisiensi capaian kinerja =  $64,20 - 100\% = -35,8\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 93,57\% = 6,43\%$

Total Efisiensi =  $-35,8\% + 6,43\% = -29,37\%$

Efisiensi kinerja sebesar -35,8% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 6,43% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -29,37%,. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 'Kurang Baik'.

#### 4. PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN DENGAN PRASARANA YANG MEMENUHI STANDAR PENDIDIKAN

Sarana dan prasarana memenuhi standar pendidikan berarti fasilitas yang dimiliki dan digunakan oleh satuan pendidikan telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penyelenggaraan proses pembelajaran sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif, aman, nyaman, dan berkualitas.

##### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.14

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                                                        | Satuan | Tahun 2025 |           |                    | Interpretasi    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|-----------------|
|                                                                                |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja(%) |                 |
| Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | %      | 95         | 71.50     | 75.26              | Kurang Berhasil |

Sarana prasarana merupakan aspek yang penting dalam proses peningkatan kinerja pendidikan. Pada tahun 2025 jumlah SD sederajat adalah 419 unit dan tingkat Satuan Pendidikan SMP adalah 62 unit, PAUD 289 unit dan satuan pendidikan nonformal 9 unit sehingga untuk satuan pendidikan total jumlah nya adalah 779 unit.

Capaian satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi standar pendidikan adalah 300 unit SD, 44 unit SMP, 208 unit dan 9 unit satuan nonformal. Jadi total satuan pendidikan yang memenuhi sebesar 561 unit sehingga persentase capaian nya adalah sebesar  $561/779 = 72.01\%$  dengan predikat Kurang Berhasil.

##### b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.15

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama                                                        | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|
|                                                                                |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                 |
| Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | %      | 91,89      | 85        | 93                  | 95         | 71.50     | 75.26               | Kurang Berhasil |

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian indikator Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan. Pada tahun 2024, target

indikator ini ditetapkan sebesar 91,89%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 85,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 93,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki prasarana yang sesuai dengan standar, meskipun masih terdapat sejumlah satuan pendidikan yang memerlukan peningkatan sarana pendukung untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, target ditingkatkan menjadi 95,00% sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Namun, realisasi yang dicapai hanya sebesar 71,50%, sehingga capaian kinerja menurun menjadi 75,26% dan berada pada kategori kurang berhasil. Dibandingkan tahun 2024, terjadi penurunan realisasi sebesar 13,50 poin persentase, dari 85,00% menjadi 71,50%.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 3.16

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan Tahun 2021 sampai 2025

| Indikator Kinerja Utama                                                        | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|-------|
|                                                                                |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  |
| Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | %      | 82           | 84   | 86   | 90   | 95   | -                 | 85   | 87   | 85   | 71,50 |

Dari table diatas dapat dilihat capaian Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai 2025. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan kinerja yang baik pada periode 2022–2023 karena mampu melampaui target yang ditetapkan. Namun, capaian pada tahun 2024 dan terutama tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian lebih melalui percepatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan, optimalisasi sumber pendanaan, serta penguatan perencanaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan.

Secara keseluruhan, perkembangan capaian indikator selama periode Renstra menunjukkan adanya fluktuasi kinerja. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 capaian melampaui target, penurunan yang terjadi pada tahun 2024 dan terutama tahun 2025 menyebabkan target akhir Renstra tidak tercapai. Hal ini mengindikasikan masih terdapat tantangan dalam pemenuhan

standar prasarana pendidikan, baik dari aspek pemeliharaan, rehabilitasi, maupun peningkatan fasilitas baru.

Penurunan capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran pembangunan dan rehabilitasi, meningkatnya kebutuhan standar prasarana yang harus dipenuhi, bertambahnya jumlah satuan pendidikan yang belum memenuhi kriteria, serta kondisi fisik bangunan yang mengalami penurunan kualitas. Selain itu, faktor distribusi dan prioritas pembangunan juga dapat memengaruhi capaian di lapangan.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan adalah Program Pengelolaan Pendidikan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.927.285.600,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 10.513.279.941,00 atau sekitar 92%, yang termasuk dalam program ini adalah:

- a. Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD
- b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD, SMP dan PAUD
- c. Pengadaan Mebel Sekolah SD, SMP dan PAUD
- d. Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD dan PAUD
- e. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- f. Pembangunan Ruang Kelas Baru
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan SMP dan PAUD
- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP dan PAUD
- i. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP
- j. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMP dan PAUD



gambar 3.4

monitoring kondisi sarana prasarana sekolah yang tidak layak

**e. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Faktor yang menjadi penghambat capaian indikator sarana dan prasarana sesuai standar adalah sebagai berikut:

- Dengan beberapa kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2025 seperti banjir, longsor, puting beliung, pohon tumbang, menyebabkan beberapa sarana prasarana pendidikan mengalami kerusakan.
- Terbatasnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk perbaikan/rehabilitasi gedung sekolah.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.17  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar  
Pendidikan Tahun 2025

| Sasaran                                    | Indikator Kinerja                                                              | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan | Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | 71,50           | 92                  | -20,5             |

Efisiensi capaian kinerja =  $71,50 - 100\% = -28,5\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 92\% = 8\%$

Total Efisiensi =  $-28,5\% + 8\% = -20,5\%$

Efisiensi kinerja sebesar -28,5% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 8% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -20,5%,. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi standar pendidikan 'Kurang Baik'.

## 5. PERSENTASE GURU YANG MEMENUHI KULIFIKASI PENDIDIKAN S1/D4

Guru sebagai pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing serta mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan S1/DIV. Peningkatan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, yang didorong oleh berbagai upaya seperti peningkatan kualifikasi melalui pendidikan lanjutan, program sertifikasi, serta pembinaan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Semakin tinggi persentase guru berkualifikasi S1/D4, maka semakin baik pula potensi peningkatan mutu layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik

Rumus Penghitungan :  $\text{Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4} / \text{Jmlah total seluruh guru} \times 100$

a. **Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.18

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4 Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                        | Satuan | Tahun 2025 |           |                    | Interpretasi |
|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|--------------|
|                                                |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja(%) |              |
| Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4 | %      | 98         | 93        | 94.89              | Berhasil     |

Pada saat ini sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Padang Pariaman Tahun 2025 jumlah guru sesuai dengan tingkatan adalah sebagai berikut : guru PAUD sebanyak 656 orang, guru SD sebanyak 3.621 orang, guru SMP sebanyak 1.113 orang. Sementara itu, dari 5.390 orang guru yang menjadi kewenangan tingkat kabupaten se-Kabupaten Padang Pariaman memenuhi kualifikasi S1/D4 hanya 4.982 orang.

- Guru kualifikasi S1/DIV = 4.982
- Total guru = 5.390
- Guru S1/DIV = 4.982: 5.390 x 100% = 93%

Persentase keberhasilan kinerja ini adalah 93% dari target yang 98% sehingga capaian nya sebesar 95% dengan prdikat Berhasil. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidikan ke jenjang S1/D4, serta belum optimalnya minat guru melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.



Gambar 3.5

Bimtek penguatan kapasitas tenaga pendidik

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.19  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4 Tahun 2024 dan Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                        | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                                |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4 | %      | 97         | 84,81     | 87,43               | 98         | 93        | 94,89               | Berhasil     |

Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 97%, dengan realisasi sebesar 84,81%, sehingga capaian kinerja mencapai 87,43%. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4, sehingga target yang ditetapkan belum dapat dicapai secara optimal.

Pada tahun 2025, terjadi peningkatan target menjadi 98%, seiring dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik. Realisasi kinerja juga mengalami peningkatan menjadi 93%, sehingga capaian kinerja mencapai 94,89% dan berada pada kategori berhasil. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan realisasi sebesar 8,19 poin persentase, yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pemenuhan kualifikasi akademik guru.

Secara umum, kinerja indikator ini menunjukkan tren yang positif dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya keberhasilan berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui studi lanjut, program pembinaan, serta dukungan kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4 Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20  
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4 Tahun 2021-2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama                        | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |       |      |       |      |
|------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|-------|------|-------|------|
|                                                |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021              | 2022  | 2023 | 2024  | 2025 |
| Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4 | %      | 82           | 84   | 86   | 90   | 95   | -                 | 92,42 | 92   | 84,81 | 93   |

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang cukup baik karena selama periode 2022–2023 berhasil melampaui target yang ditetapkan, dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan setelah penurunan pada tahun 2024. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 melalui fasilitasi peningkatan kualifikasi akademik, pendataan yang akurat, serta penguatan kebijakan pengembangan kompetensi guru

**d. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebanyak 2 (Dua) program adapun pencapaian masing–masing program adalah sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Pendidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.553.179.500,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 2.057.529.326,00 atau sekitar 96%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- c. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- e. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- f. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- g. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- h. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- i. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.553.179.500,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 2.057.529.326,00 atau sekitar 96%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

e. **Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Persentase keberhasilan kinerja ini adalah 93% dari target yang 98% sehingga capaian nya sebesar 95% dengan prdikat Berhasil. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidikan ke jenjang S1/D4, serta belum optimalnya minat guru melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah sbb:

- Penguatan regulasi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Gur
- Tingginya motivasi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat lanjut.

Beberapa hal upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kinerja ini adalah :

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memperluas dan meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi calon guru untuk mendapatkan kualifikasi yang diperlukan. Ini bisa termasuk beasiswa, insentif, dan program pendidikan jarak jauh.

- b. Rekrutmen yang Intensif: Mengadakan program rekrutmen yang intensif untuk menarik individu berpendidikan tinggi untuk memilih karier sebagai guru. Ini bisa melalui promosi di universitas dan institusi pendidikan lainnya.
- c. Peningkatan Insentif dan Gaji: Meningkatkan insentif finansial dan gaji bagi guru dengan pendidikan tinggi untuk membuat profesi ini lebih menarik secara ekonomi.
- d. Program Pengembangan Profesional: Menyediakan program pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru yang sedang mengajar, termasuk pendidikan lanjutan dalam bidang mereka dan pelatihan dalam metode pengajaran terbaru.
- e. Kemitraan dengan Universitas: Membangun kemitraan antara lembaga pendidikan dasar dan universitas untuk memfasilitasi jalur karier yang jelas bagi lulusan yang tertarik untuk menjadi guru.
- f. Promosi Profesi Guru: Melakukan kampanye promosi yang kuat untuk meningkatkan citra profesi guru dan menarik individu berpendidikan tinggi untuk memilih karier ini.
- g. Fasilitasi Perpindahan Karier: Memfasilitasi perpindahan karier dari profesi lain ke profesi guru melalui program konversi kualifikasi atau pelatihan.
- h. Meningkatkan Kesejahteraan Guru: Memperbaiki kondisi kerja dan kesejahteraan guru, termasuk dukungan psikologis dan lingkungan kerja yang positif, agar lebih menarik bagi individu berpendidikan tinggi.
- i. Evaluasi Kebijakan dan Program: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk meningkatkan jumlah guru berpendidikan tinggi, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.21  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase guru yang memenuhi kualifikas S1/D4 Tahun  
2025

| Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian<br>Kinerja | Penyerapan<br>Anggaran | Tingkat<br>Efisiensi |
|---------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
|---------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|

|                                            |                                                 |       |    |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----|-------|
| Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 | 94,89 | 96 | -20,5 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----|-------|

Efisiensi capaian kinerja =  $94,89 - 100\% = -5,11\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 96\% = 4\%$

Total Efisiensi =  $-5,11\% + 4\% = -1,11\%$

Efisiensi kinerja sebesar -5,11% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 4% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -1,11%,. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 'Kurang Baik'.

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sasaran 2: Meningkatkan perlindungan warisan budaya.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Table 3.22  
Indikator Kinerja Meningkatnya perlindungan warisan budaya

| No | Sasaran                                  | Indikator Kinerja                                   | Target | Realisasi | %      | Predikat        |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------|
| 1  | Meningkatnya perlindungan warisan budaya | Persentase cagar budaya yang dilindungi             | 90     | 100       | 111.11 | Sangat Berhasil |
| 2  |                                          | Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi | 100    | 100       | 100    | Sangat Berhasil |

## 1. PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI

Definisi cagar budaya yang dilindungi yang menjadi target kinerja dari urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adalah memiliki aspek hukum, regulasi, dan kebijakan perlindungan warisan budaya yang ada. Cagar budaya yang dilindungi dapat mencakup berbagai jenis :

- Situs Bersejarah: Tempat-tempat arkeologis, seperti reruntuhan kota kuno, makam kuno, atau situs prasejarah yang memiliki nilai sejarah yang penting.
- Bangunan Bersejarah: Struktur bangunan yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, atau

- keunikan budaya, seperti istana bersejarah, gereja-gereja kuno, atau bangunan kolonial.
- c. Artefak Budaya: Objek-objek seni, kerajinan, atau benda-benda sejarah yang memiliki nilai seni, keindahan, atau signifikansi budaya, seperti lukisan, patung, perabotan kuno, atau artefak-artefak arkeologis.
  - d. Lanskap Budaya: Area-area yang memiliki nilai budaya atau sejarah yang penting, seperti lanskap budaya pertanian tradisional, situs-situs alam yang memiliki keunikan budaya, atau kawasan pelestarian alam yang memiliki nilai budaya yang tinggi.

Rumus Penghitungan :  $\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi)}}{\text{jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100$

Gambar 3.6

Anugrah cagar budaya dan cagar buaya kab. Padang pariaman



#### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase cagar budaya yang dilindungi Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2025 |           |                    | Interpretasi |
|-------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|--------------|
|                         |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja(%) |              |

|                                         |   |    |     |        |          |
|-----------------------------------------|---|----|-----|--------|----------|
| Persentase cagar budaya yang dilindungi | % | 90 | 100 | 111.11 | Berhasil |
|-----------------------------------------|---|----|-----|--------|----------|

Pada tahun 2025, Realisasi kinerja persentase cagar budaya yang dilindungi adalah 100% dari target 90% yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah cagar budaya yang dilindungi = 2
- Jumlah cagar budaya yang terdata di tahun 2025 = 2
- Persentase cagar budaya yang dilindungi =  $2 : 2 \times 100\% = 100\%$

#### b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025

Tabel 3.23  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase cagar budaya yang dilindungi Tahun 2024 dan Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                 | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                         |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Persentase cagar budaya yang dilindungi | %      | 90         | 87,91     | 97,7                | 90         | 100       | 111.11              | Berhasil     |

Dari table diatas dapat dilihat terjadi peningkatan sebesar 12,09 dari capaian kinerja persentase cagar budaya yang dilindungi dari tahun 2024 sebesar 87,91 menjadi 100 di tahun 2025. Kenaikan ini hasil upaya perlindungan yang optimal terhadap objek cagar budaya yang ada di kabupaten padang pariaman.

#### c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24  
Perbandingan Realisasi Kinerja persentase cagar budaya yang dilindungi Tahun 2021-2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama                 | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |       |      |
|-----------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|-------|------|
|                                         |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021              | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 |
| Persentase cagar budaya yang dilindungi | %      | 67           | 83   | 86   | 85   | 85   | -                 | 93   | 85   | 84,81 | 93   |

Secara keseluruhan, capaian indikator Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 target belum sepenuhnya tercapai, capaian pada tahun 2022 dan 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan cagar budaya di daerah telah berjalan cukup efektif dan perlu terus ditingkatkan melalui pendataan yang berkelanjutan, penguatan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan pelestarian cagar budaya di masa mendatang.

**d. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Iku**

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Persentase cagar budaya yang dilindungi terdapat Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 468.887.500,00- dan realisasi keuangan mencapai Rp 113.797.589,00-atau sekitar 24%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
- b. Penetapan Cagar Budaya
- c. Pelindungan Cagar Budaya

**e. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian kinerja persentase cagar budaya yang dilindungi didukung oleh beberapa faktor pendukung diantaranya :

- 1) Adanya regulasi yang jelas terkait perlindungan cagar budaya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- 2) Dukungan pemerintah daerah melalui program pelestarian dan penganggaran.
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya.

- 4) Adanya kerja sama dengan akademisi, komunitas sejarah, dan pemerhati budaya dalam kegiatan inventarisasi dan pelestarian.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan, dokumentasi, dan publikasi cagar budaya.

Sementara itu faktor penghambat dalam persentase cagar budaya yang dilindungi adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, dan revitalisasi cagar budaya.
- 2) Kurangnya tenaga ahli, seperti arkeolog, konservator, dan tim teknis pelestarian.
- 3) Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat dan pemilik objek terhadap pentingnya perlindungan cagar budaya.
- 4) Ancaman kerusakan akibat faktor alam, usia bangunan, bencana, maupun aktivitas manusia.
- 5) Belum optimalnya pendataan dan penetapan objek yang berpotensi menjadi cagar budaya.
- 6) Lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian.

Maka dari itu alternatif Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan alokasi anggaran dan mengoptimalkan sumber pendanaan dari pemerintah, CSR, maupun kemitraan dengan pihak swasta.
- 2) Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola cagar budaya secara berkala.
- 3) Memperkuat sosialisasi, edukasi, dan kampanye pelestarian kepada masyarakat dan pemilik cagar budaya.
- 4) Mengembangkan sistem database digital yang terintegrasi untuk inventarisasi dan monitoring kondisi cagar budaya.
- 5) Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah, komunitas, akademisi, dan instansi terkait.
- 6) Melakukan pemeliharaan rutin, konservasi, dan mitigasi risiko bencana pada objek cagar budaya.

- 7) Mempercepat proses identifikasi, kajian, dan penetapan objek yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.25  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Persentase cagar budaya yang dilindungi Tahun 2025

| Sasaran                                  | Indikator Kinerja                       | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya perlindungan warisan budaya | Persentase cagar budaya yang dilindungi | 100             | 24                  | 76                |

Efisiensi capaian kinerja =  $100 - 100\% = 0\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 24\% = 76\%$

Total Efisiensi =  $0\% + 24\% = 76\%$

Tingginya angka efisiensi pada tahun 2025 ini mengindikasikan bahwa seluruh program pelestarian cagar budaya tahun 2025 berhasil dilaksanakan melalui metode yang sangat hemat biaya, seperti penguatan koordinasi lintas sektor atau optimalisasi swadaya masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada belanja daerah. Capaian ini menjadi preseden positif dalam penerapan prinsip *Value for Money*, di mana output maksimal dapat dihasilkan melalui penggunaan sumber daya finansial yang minimal.

**2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi**

Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi adalah ukuran proporsi atau persentase dari total warisan budaya tak benda suatu wilayah atau negara yang secara resmi diakui dan dilindungi oleh pemerintah atau lembaga terkait dari kerusakan, kehilangan, atau perubahan yang merugikan. Rumus Penghitungan : Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan/ jumlah total warisan budaya yang ditetapkan x 100

Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi mencerminkan seberapa banyak dari warisan budaya tersebut yang telah diidentifikasi, didokumentasikan, dan diberikan perlindungan hukum atau administratif yang sesuai. Hal ini dapat menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesadaran dan komitmen suatu negara terhadap pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya tak benda mereka.

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                             | Satuan | Tahun 2025 |           |                    | Interpretasi |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|--------------|
|                                                     |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja(%) |              |
| Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi | %      | 100        | 100       | 100                | Berhasil     |

Pada tahun 2025, Realisasi kinerja ini adalah 100% dari target 100% yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan = 3
- jumlah total warisan budaya yang ditetapkan = 3
- Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi =  $3 : 3 \times 100\% = 100\%$

Predikat sangat berhasil. Namun, walaupun demikian, dengan keterbatasan SDM dan alokasi anggaran, masih banyak terdapat warisan budaya tak benda yang terdata dan terlindungi.

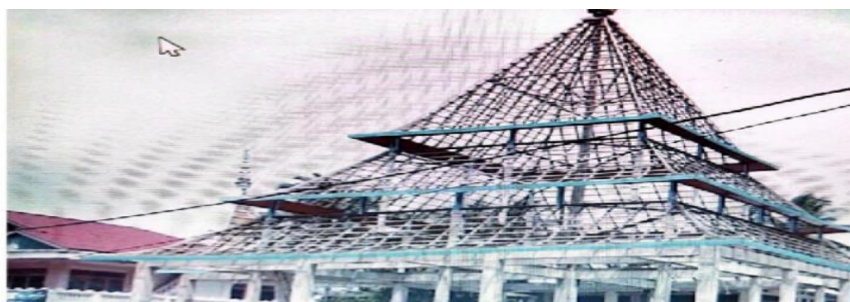


Foto 3.7

Ket : warisan budaya tak benda (kegiatan batagak kudo-kudo)

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.27

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi Tahun 2024 dan Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                             | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                                     |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi | %      | 55         | 100       | 181,8               | 100        | 100       | 100                 | Berhasil     |

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi dari tahun 2024 dan 2025 capaian nya sama yaitu sebesar 100%.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja warisan budaya tak benda yang dilindungi Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.28

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi Tahun 2021-2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama                             | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                     |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi | %      | 30           | 45   | 50   | 55   | 66   | -                 | 0    | 55   | 100  | 100  |

indikator Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik. Meskipun pada tahun 2022 capaian belum memenuhi target, namun sejak tahun 2023 hingga 2025 realisasi mengalami peningkatan signifikan dan berhasil melampaui target yang ditetapkan

**d. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Persentase Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran terdapat 3 (tiga) Program yaitu program pengembangan kebudayaan. Program pengembangan kesenian tradisional dan program pembinaan sejarah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.811.989.700,00- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.293.778.816,00-atau sekitar 71%, yang termasuk dalam program ini adalah subkegiatan :

- a. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- b. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- d. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- e. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

**e. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi didukung oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan dan peraturan terkait pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) menjadi landasan dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.
2. Dukungan program dan kegiatan pelestarian budaya dari pemerintah daerah, lembaga adat, komunitas budaya, dan akademisi mendorong peningkatan jumlah WBTB yang terlindungi.
3. Keterlibatan masyarakat, seniman, budayawan, dan komunitas adat dalam menjaga serta mewariskan tradisi menjadi faktor penting dalam keberlangsungan WBTB.
4. Inventarisasi dan dokumentasi yang baik mempermudah proses identifikasi, pencatatan, dan pengusulan WBTB untuk memperoleh status perlindungan.

5. Digitalisasi data budaya dan publikasi melalui media digital membantu memperluas akses informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya.

Sementara itu faktor yang menjadi penghambat dalam capaian persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat unsur budaya yang belum terdokumentasi dan teridentifikasi secara lengkap sehingga belum dapat diusulkan untuk mendapatkan perlindungan.
2. Keterbatasan dana berdampak pada pelaksanaan kegiatan penelitian, dokumentasi, pendampingan komunitas, serta pengusulan WBTB.
3. Jumlah tenaga yang memiliki kompetensi dalam bidang pelestarian budaya, penelitian, dan penyusunan dokumen usulan masih terbatas.
4. Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan tradisi menyebabkan beberapa warisan budaya berisiko mengalami kepunahan.
5. Perubahan pola hidup masyarakat mengakibatkan berkurangnya praktik budaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pengusulan WBTB memerlukan kelengkapan dokumen, kajian, dan tahapan evaluasi yang cukup panjang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ini adalah :

- a. Pengakuan dan Pencatatan: Mengidentifikasi dan mencatat elemen-elemen warisan budaya tak benda yang penting melalui survei, penelitian, dan konsultasi dengan komunitas lokal dan para ahli budaya.
- b. Pengembangan Kebijakan Perlindungan: Membuat undang-undang, regulasi, atau kebijakan khusus untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda, serta menetapkan status khusus dan pengakuan resmi terhadap elemen-elemen ini.
- c. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya warisan budaya tak benda, mempromosikan apresiasi terhadap tradisi dan praktik budaya mereka, serta meningkatkan kesadaran akan ancaman yang mungkin dihadapi oleh warisan ini.
- d. Partisipasi Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda, serta

memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam menjaga dan memelihara tradisi mereka sendiri.

- e. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda, baik di kalangan generasi muda maupun anggota masyarakat secara umum.
- f. Kolaborasi Antar Pihak: Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda.
- g. Pendokumentasian dan Penelitian: Melakukan dokumentasi lengkap tentang elemen-elemen warisan budaya tak benda, termasuk pengumpulan cerita, gambar, rekaman audio/video, dan data lainnya untuk keperluan penelitian dan pemeliharaan.
- h. Pengembangan Program Budaya dan Festival: Mengadakan acara-acara budaya dan festival untuk mempromosikan warisan budaya tak benda, serta memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan mereka.
- i. Penggunaan Teknologi dan Media: Memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk mempromosikan dan membagikan informasi tentang warisan budaya tak benda dengan lebih luas, serta untuk mendukung upaya dokumentasi dan pendidikan.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.29  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi Tahun 2025

| Sasaran                                  | Indikator Kinerja                                   | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya perlindungan warisan budaya | Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi | 100             | 71                  | 29                |

Efisiensi capaian kinerja =  $100 - 100\% = 0\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 71\% = 29\%$

Total Efisiensi =  $0\% + 29\% = 29\%$

Pada tahun 2025 program yang mendukung capaian indikator Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi mencatatkan erapan anggaran tercatat sebesar 71%. Terdapat selisih sebesar 29% antara anggaran yang dialokasikan dengan anggaran yang digunakan. Penyerapan yang tidak mencapai 100% dalam konteks ini tidak menunjukkan kegagalan penyerapan, melainkan mencerminkan optimalisasi biaya dalam pelaksanaan program



**Sasaran 3 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**

**1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan aspek penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mengacu pada kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja serta pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.30  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Tahun 2025

| No | Sasaran                                             | Indikator Kinerja                               | Target | Realisasi | %     | Predikat |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------|
| 1  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat | 80,05  | 77.70     | 97,06 | Berhasil |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan dalam penilaian sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2025 sebesar 80,01 (A) namun hanya dapat di capai sebesar 77.70 (BB) sehingga capainya menjadi 97,06 dengan predikat “Berhasil”.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.31  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Tahun 2024 dan Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama                         | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                                 |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat | %      | 80,01      | 74,35     | 92,92               | 80,05      | 77,70     | 97,06               | Berhasil     |

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian hasil penilaian evaluasi sakip dari inspektorat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2024 capaian sebesar 74,35 namun pada tahun 2025 capaiannya nya naik sebesar 3,35 menjadi 77,70.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah**  
Perbandingan target pada Renstra 2021-2026 dengan realisasi Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.32  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Tahun Tahun 2021-2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama                         | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |            |            |
|-------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------------|------------|
|                                                 |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021              | 2022 | 2023 | 2024       | 2025       |
| Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat | %      | BB           | A    | A    | A    | A    | BB                | BB   | BB   | 74,35 (BB) | 77,70 (BB) |

capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif karena nilai evaluasi SAKIP terus mengalami peningkatan dan mampu mempertahankan predikat **BB** selama periode pengukuran. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan yang lebih intensif untuk mencapai predikat **A**, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, penguatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, penyempurnaan indikator kinerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi.

**d. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Iku**

Terdapat 1( satu) Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat yaitu Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan didukung oleh 6 (enam) kegiatan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 505.499.322.073,41 - dan realisasi keuangan mencapai Rp 333.523.300.948,00 -atau sekitar 65,98%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. **Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Target yang di tetapkan dalam penilaian sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2025 sebesar 80,01 (A) namun hanya dapat di capai sebesar 77.70 (BB).

Hal in disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya:

1. Perbedaan atau ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan, dokumen perencanaan dengan dokumen monitoring dan evaluasi.
2. Belum optimalnya pengawasan secara berkala.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana banyak pegawai di perangkat daerah yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
4. Pengumpulan dan analisis data kinerja yang tidak tepat waktu atau tidak akurat bisa menghambat proses peningkatan akuntabilitas.

Berikut beberapa langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan :

- a. Penetapan Sasaran dan KPI Perangkat Daerah harus menetapkan sasaran yang jelas dan terukur serta indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators/KPI) untuk menilai

pencapaian tujuan. Sasaran dan KPI harus dapat diukur secara objektif dan memungkinkan untuk pemantauan yang efektif.

- b. **Transparansi Informasi ; Meningkatkan transparansi** dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang kinerja Perangkat Daerah, termasuk laporan kinerja, anggaran, kebijakan, dan hasil evaluasi. Ini dapat dilakukan melalui situs web resmi, forum publik, atau media sosial.
- c. **Mekanisme Pengawasan; Membangun mekanisme pengawasan yang kuat**, seperti badan pengawas atau komite independen, untuk memantau kinerja Perangkat Daerah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mekanisme ini harus memiliki kewenangan yang cukup dan mandiri untuk melakukan tugas pengawasan mereka.
- d. **Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat; Mendorong partisipasi aktif masyarakat** dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Ini dilakukan melalui konsultasi publik, forum partisipatif, atau mekanisme lain yang melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan.
- e. **Penghargaan dan Sanksi; Menetapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas** berdasarkan kinerja Perangkat Daerah. Ini dapat mencakup penghargaan untuk pencapaian yang baik dan sanksi untuk kinerja yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
- f. **Pelatihan dan Pengembangan Pegawai ; Memberikan pelatihan dan pengembangan yang kontinyu kepada pegawai Perangkat Daerah** untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka dalam mencapai tujuan organisasi dan memenuhi harapan masyarakat.
- g. **Penerapan Teknologi Informasi ; Memanfaatkan teknologi informasi** untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan layanan pemerintah daerah.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, terutama terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.33  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi Tahun 2025

| Sasaran                                             | Indikator Kinerja                               | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat | 97,06           | 65,98               | 31,62             |

Efisiensi capaian kinerja =  $97,06 - 100\% = -2,94\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 65,98\% = 34,02\%$

Total Efisiensi =  $-2,89\% + 34,02\% = 31,08\%$

Tingkat efisiensi tercatat sebesar 31,08%, yang menunjukkan adanya selisih positif antara capaian kinerja yang tinggi dengan penyerapan anggaran yang relatif lebih rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilakukan secara efektif dan efisien, dengan hasil yang optimal terhadap penggunaan sumber daya yang tersedia.

## II. REALISASI KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

|                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sasaran 1 :</b><br>Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.34  
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                   | Target | Realisasi | %   | Predikat |
|----|-------------------------------------|--------|-----------|-----|----------|
| 1  | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) | 77,7   | 77,70     | 100 | Berhasil |

Dari table diatas dapat dilihat capaian nilai akip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 sebesar 77,7 dari target 77,70 sehingga capaian kinerjanya menjadi sebesar 100

dengan predikat Berhasil. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah berjalan dengan baik dan hampir seluruh target yang direncanakan berhasil dicapai. Dengan tingkat pencapaian sebesar 100%, indikator ini memperoleh predikat “Berhasil”, yang mencerminkan konsistensi perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara efektif. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa aspek pengelolaan kinerja agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara penuh pada periode berikutnya.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.35

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama             | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|-------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                     |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) | %      | 80,01      | 74,35     | 92,92               | 77,7       | 77,70     | 100                 | Berhasil     |

Pada tahun 2024, target Nilai AKIP Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 80,01, dengan realisasi sebesar 74,35, sehingga capaian kinerja mencapai 92,92%. Meskipun realisasi belum mencapai target yang ditetapkan, tingkat pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan cukup baik dan menjadi dasar untuk perbaikan pada periode berikutnya.

Pada tahun 2025, target Nilai AKIP ditetapkan sebesar 77,7, dengan realisasi sebesar 77,70. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja mencapai 100%, sehingga memperoleh interpretasi “berhasil”. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi nilai AKIP hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja perangkat daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Meskipun realisasi masih sedikit di bawah target, tingkat capaian yang mendekati 100% menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja agar nilai AKIP dapat terus meningkat dan mencapai target yang ditetapkan.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.36

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah 2025-2029 dengan Target Renstra

| c                                   | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                     |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) | %      | 77,70        | 79,98 | 82,33 | 84,55 | 86,83 | 77,70             |      | -    | -    | -    |

Dari table diatas dapat dilihat capaian nilai AKIP perangkat daerah hanya di tahun 2025 sebesar 77,70. Hal tersebut dikarenakan periode awal renstra tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah mencapai **77,70**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran kinerja tahun 2025 berhasil dipenuhi secara optimal dan mencerminkan konsistensi perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta menjadi fondasi yang baik untuk mencapai target peningkatan nilai AKIP pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia sehingga evaluasi terhadap capaian pada periode tersebut belum dapat dilakukan. Namun demikian, dengan tercapainya target tahun 2025, diharapkan upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP dapat terus dipertahankan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan daerah.

**d. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Terdapat 1( satu) Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian nilai AKIP perangkat daerah yaitu Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan didukung oleh 6 (enam) kegiatan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 505.499.322.073,41 - dan realisasi keuangan mencapai Rp 333.523.300.948,00 -atau sekitar 65,98%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. **Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Target yang di tetapkan dalam penilaian sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2025 sebesar 77,70 dapat di capai sebesar 77.70 (BB).

Hal in disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya:

1. Perbedaan atau ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan, dokumen perencanaan dengan dokumen monitoring dan evaluasi.
2. Belum optimalnya pengawasan secara berkala.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana banyak pegawai di perangkat daerah yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
4. Pengumpulan dan analisis data kinerja yang tidak tepat waktu atau tidak akurat bisa menghambat proses peningkatan akuntabilitas.

Berikut beberapa langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan :

- 1) Penetapan Sasaran dan KPI Perangkat Daerah harus menetapkan sasaran yang jelas dan terukur serta indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators/KPI) untuk menilai pencapaian tujuan. Sasaran dan KPI harus dapat diukur secara objektif dan memungkinkan untuk pemantauan yang efektif.
- 2) Transparansi Informasi ; Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang kinerja Perangkat Daerah, termasuk laporan kinerja, anggaran, kebijakan, dan hasil evaluasi. Ini dapat dilakukan melalui situs web resmi, forum publik, atau media sosial.

- 3) Mekanisme Pengawasan; Membangun mekanisme pengawasan yang kuat, seperti badan pengawas atau komite independen, untuk memantau kinerja Perangkat Daerah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mekanisme ini harus memiliki kewenangan yang cukup dan mandiri untuk melakukan tugas pengawasan mereka.
- 4) Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat; Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Ini dilakukan melalui konsultasi publik, forum partisipatif, atau mekanisme lain yang melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Penghargaan dan Sanksi; Menetapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas berdasarkan kinerja Perangkat Daerah. Ini dapat mencakup penghargaan untuk pencapaian yang baik dan sanksi untuk kinerja yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
- 6) Pelatihan dan Pengembangan Pegawai ; Memberikan pelatihan dan pengembangan yang kontinyu kepada pegawai Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka dalam mencapai tujuan organisasi dan memenuhi harapan masyarakat.
- 7) Penerapan Teknologi Informasi ; Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan layanan pemerintah daerah.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, terutama terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.37  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

| Sasaran                          | Indikator<br>Kinerja | Capaian<br>Kinerja | Penyerapan<br>Anggaran | Tingkat<br>Efisiensi |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Meningkatnya<br>transparansi dan | Nilai<br>AKIP        | 100                | 65,98                  | 34,02                |

|                                                          |                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| akuntabilitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintah<br>daerah | Perangkat<br>Daerah<br>(Nilai) |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|

Efisiensi capaian kinerja =  $100 - 100\% = 0\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 65,98\% = 34,02\%$

Total Efisiensi =  $-0\% + 34,02\% = 34,02\%$

Tingkat efisiensi tercatat sebesar 34,02%, yang menunjukkan adanya selisih positif antara capaian kinerja yang tinggi dengan penyerapan anggaran yang relatif lebih rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilakukan secara efektif dan efisien, dengan hasil yang optimal terhadap penggunaan sumber daya yang tersedia.



### **Sasaran 2 :**

Meningkatnya standar dan mutu pendidikan

#### **a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.38

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks SPM Pendidikan Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja     | Target | Realisasi | %     | Predikat |
|----|-----------------------|--------|-----------|-------|----------|
| 1  | Indeks SPM Pendidikan | 72.50  | 72.20     | 99.58 | Berhasil |

Indeks Standar pelayanan Minimal (SPM) ini menunjukkan sejauh mana layanan pendidikan dasar telah tersedia, terjangkau, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Nilainya dihitung berdasarkan capaian beberapa indikator utama, seperti akses pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana.

Capaian Indeks SPM Pendidikan pada tahun 2025 tercatat sebesar 72,2, sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu 72,5. Meskipun demikian, tingkat pencapaian kinerja telah

mencapai 99,6%, yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini hampir sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan.

Hasil tersebut mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan telah berjalan dengan baik dan konsisten. Selisih yang sangat kecil antara target dan realisasi mengindikasikan bahwa sebagian besar komponen layanan pendidikan—baik dari sisi akses, mutu, maupun sarana pendukung—telah terpenuhi sesuai standar.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.39

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks SPM Pendidikan Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|-------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                         |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Indeks SPM Pendidikan   | indeks | -          | 71,01     | -                   | 72.5       | 72.2      | 99.58               | Berhasil     |

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan sebesar 1,19 pada capaian indek SPM pendidikan dari tahun sebelumnya 71,01 dan menjadi 72,2 di tahun 2025. Capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah berada pada kategori sangat baik dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Indeks SPM Pendidikan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.40

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator indeks SPM pendidikan Tahun 2021-2025 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                         |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Indeks SPM Pendidikan   | %      | 72,50        | 77,74 | 78,86 | 79,42 | 79,70 | 72,20             | -    | -    | -    | -    |

Pada tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 72,20%, atau sedikit lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 72,50%. Selisih ini menunjukkan adanya

capaian yang relatif dekat dengan target, meskipun masih terdapat sedikit deviasi yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan.

Sementara itu, untuk tahun 2026 hingga 2029, data realisasi belum tersedia, sehingga belum dapat dilakukan analisis kesesuaian antara target dan capaian pada periode tersebut. Namun demikian, tren target yang meningkat setiap tahun menunjukkan adanya komitmen untuk terus memperkuat pemenuhan standar pelayanan minimal di sektor pendidikan.

Secara keseluruhan, capaian awal tahun 2025 memberikan gambaran bahwa kinerja sudah berada pada level yang mendekati target, namun tetap diperlukan penguatan program dan intervensi kebijakan agar target tahunan berikutnya dapat tercapai secara konsisten.

**d. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Terdapat 1( satu) Program yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Indeks SPM pendidikan yaitu Program pengelolaan pendidikan dan didukung oleh 4 (Empat) kegiatan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 95.743.615.554,00 - dan realisasi keuangan mencapai Rp 88.237.369.799,00-atau sekitar 92,16%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- 4) Pengelolaan pendidikan Nonformal/kesetaraan

Gambar 3.8

Pelaksanaan ujian Assessment nasional di satuan pendidikan



Pemberian seragam gratis untuk peserta didik



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian kinerja Indeks SPM Pendidikan didukung oleh beberapa faktor pendukung diantaranya :

- 1) Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan menjadi acuan yang jelas dalam pemenuhan layanan dasar pendidikan.

- 2) Dukungan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan melalui program prioritas, alokasi anggaran, serta penguatan kebijakan pendidikan.
- 3) Peningkatan dan pemerataan fasilitas pendidikan membantu mendukung pencapaian indikator SPM.
- 4) Guru yang semakin berkualitas melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kualifikasi berdampak pada peningkatan layanan pendidikan.
- 5) Data pendidikan yang semakin akurat dan terintegrasi mendukung perencanaan dan evaluasi capaian SPM secara lebih tepat.

Sementara itu faktor yang menjadi penghambat dari tidak berhasilnya capaian Indeks SPM pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Perbedaan kondisi geografis menyebabkan sebagian daerah sulit menjangkau layanan pendidikan yang optimal.
- 2) Dana yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pemenuhan standar layanan pendidikan.
- 3) Ketidakeimbangan jumlah guru di daerah perkotaan dan daerah terpencil mempengaruhi kualitas layanan.
- 4) Beberapa satuan pendidikan masih membutuhkan peningkatan fasilitas untuk memenuhi standar SPM.
- 5) Data yang belum sepenuhnya mutakhir dapat mempengaruhi akurasi pengukuran capaian SPM.

Solusi dan perbaikan yang dilaksanakan untuk pencapaian indeks SPM pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Menggunakan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan peningkatan layanan pendidikan.
- 2) Memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan layanan dasar pendidikan sesuai indikator SPM.
- 3) Penempatan guru secara lebih proporsional, termasuk insentif bagi daerah terpencil.
- 4) Melakukan rehabilitasi, pembangunan, dan pengadaan fasilitas pendidikan secara bertahap dan terarah.
- 5) Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian SPM untuk memastikan perbaikan berkelanjutan

- 6) Digitalisasi data pendidikan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan kemudahan monitoring.
- 7) Melibatkan pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan standar layanan pendidikan.

f. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.41  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi Tahun 2025

| Sasaran                                  | Indikator Kinerja     | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya standar dan mutu pendidikan | Indeks SPM Pendidikan | 99,58           | 92,16               | 7,42              |

Efisiensi capaian kinerja =  $99,58 - 100\% = -0,42\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 92,16\% = 7,84\%$

Total Efisiensi =  $-0,42\% + 7,84\% = 7,42\%$

Efisiensi kinerja sebesar 0,42% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 7,84% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 7,42%,. Angka positif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Indeks SPM Pendidikan 'berjalan Baik'.

|                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Sasaran 3 :</b></p> <p>Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 3.42  
Indikator dan Capaian Kinerja Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan

| No | Indikator Kinerja                  | Target | Realisasi | %     | Predikat        |
|----|------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------|
| 1  | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 51,55  | 40        | 77,59 | Kurang Berhasil |

|    |                                                             |        |        |        |                 |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 2  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                            | 119,3  | 105,69 | 88,59  | Cukup Berhasil  |
| 3  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                           | 98,1   | 95,71  | 97,56  | Berhasil        |
| 4  | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun                | 51,35  | 39,3   | 76,53  | Cukup Berhasil  |
| 5  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD                            | 91,68  | 96,89  | 105,68 | Sangat Berhasil |
| 6  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                           | 80,32  | 82,13  | 102,25 | Sangat Berhasil |
| 7  | Rasio Murid terhadap Guru PAUD                              | 11,558 | 11,16  | 96,56  | Berhasil        |
| 8  | Rasio Murid terhadap Guru SD                                | 13     | 12,38  | 95,23  | Berhasil        |
| 9  | Rasio Murid terhadap Guru SMP                               | 14     | 13,37  | 95,5   | Berhasil        |
| 10 | Persentase anak tidak sekolah                               | 6,5    | 7,17   | 89,69  | Cukup Berhasil  |
| 11 | Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD | 0,0201 | 0,0193 | 96,01  | Berhasil        |
| 12 | Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD     | 0,0098 | 0,0088 | 89,79  | Cukup Berhasil  |
| 13 | Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP   | 0,0028 | 0,0024 | 85,71  | Cukup Berhasil  |

## 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD merupakan indikator kinerja utama pada periode renstra sebelumnya tahun 2021-2026 dan sudah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar, tanpa membedakan usia. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh siswa yang terdaftar di SD—baik yang berada pada usia sekolah dasar maupun di luar usia tersebut—terhadap jumlah penduduk usia resmi SD, kemudian dinyatakan dalam persentase.

### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.43  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                | Target | Realisasi | %     | Predikat       |
|----|----------------------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 1  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 119,3  | 105,69    | 88,59 | Cukup Berhasil |

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Pada periode ini, target yang ditetapkan sebesar 119,3%, dengan realisasi mencapai 105,69%.

Berdasarkan perhitungan kinerja, capaian terhadap target adalah sebesar 88,59%, sehingga predikat kinerja dikategorikan sebagai “cukup berhasil”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program pendidikan dasar telah berjalan dan mampu menjangkau sebagian besar peserta didik, hasil yang dicapai masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi yang berada di bawah target mengindikasikan adanya tantangan dalam peningkatan partisipasi pendidikan, seperti masih adanya anak usia sekolah yang belum terlayani secara optimal atau faktor lain yang mempengaruhi akses dan keberlanjutan pendidikan dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan tidak hanya menjangkau anak usia sekolah dasar, tetapi juga mencakup anak di luar usia ideal, baik yang masuk lebih awal maupun yang mengalami keterlambatan.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.44  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD  
Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama          | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                  |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | %      | -          | -         | -                   | 119,3      | 105,69    | 88,59               | Berhasil     |

Pada tahun 2025, target APK SD ditetapkan sebesar 119,3%, dengan realisasi sebesar 105,69%. Berdasarkan perhitungan, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 88,59% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi belum mencapai target yang direncanakan, capaian ini tetap dikategorikan sebagai “berhasil”, yang menunjukkan bahwa program dan kebijakan di bidang pendidikan dasar masih mampu menjaga tingkat partisipasi sekolah pada kategori yang relatif tinggi.

Capaian APK yang lebih dari 100% juga mengindikasikan bahwa jumlah peserta didik di jenjang SD tidak hanya berasal dari kelompok usia sekolah ideal, tetapi juga mencakup siswa di luar usia tersebut, yang umum terjadi dalam pengukuran APK. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang masuk sekolah lebih awal atau mengalami tinggal kelas, sehingga meningkatkan angka partisipasi secara keseluruhan.

Secara umum, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, kinerja tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup baik dan masih berada dalam kategori keberhasilan, namun tetap diperlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya.

- c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**  
Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Pendidikan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.45  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Tahun 2025-2029  
dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama          | Satuan | Target RPJMD |       |      |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|----------------------------------|--------|--------------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                  |        | 2025         | 2026  | 2027 | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | %      | 119,3        | 122,6 | 126  | 129,3 | 132,7 | 105,69            | -    | -    | -    | -    |

Pada tahun 2025, realisasi APK SD tercatat sebesar 105,69%, yang masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 119,3%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target perencanaan dan capaian aktual, sehingga diperlukan upaya penguatan program wajib belajar, peningkatan partisipasi sekolah, serta penjangkauan anak usia sekolah yang belum terlayani secara optimal.

Sementara itu, untuk tahun 2026 hingga 2029, data realisasi belum tersedia, sehingga belum dapat dilakukan evaluasi capaian pada periode tersebut. Namun demikian, arah kebijakan RPJMD yang menetapkan peningkatan target setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dasar secara bertahap dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 memberikan gambaran bahwa partisipasi pendidikan sudah cukup tinggi, namun masih terdapat kebutuhan intervensi kebijakan agar kesenjangan terhadap target dapat diperkecil pada tahun-tahun berikutnya.

**d. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
- b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- e. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- f. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.190.908.240,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 44.603.040.879,- atau sekitar 99%.

Gambar 3.9

Prose Belajar Satuan Pendidikan SD



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Faktor pendukung yang menjadi faktor keberhasilan dari indikator Angka Partisipasi kasar (APK) SD yaitu :

- 1) Program wajib belajar dan kebijakan pendidikan dasar gratis yang mendorong seluruh anak usia sekolah untuk bersekolah.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, ruang kelas, dan fasilitas belajar.
- 3) Dukungan pemerintah melalui bantuan pendidikan, seperti dana BOS dan bantuan perlengkapan sekolah.
- 4) Kesadaran masyarakat dan orang tua yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan dasar.
- 5) Ketersediaan tenaga pendidik yang cukup dan tersebar di wilayah layanan pendidikan.
- 6) Akses transportasi yang lebih baik menuju sekolah.

Sementara itu faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan mencapai target dari indikator APK SD yaitu :

- 1) Kondisi geografis yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil, kepulauan, atau pegunungan.
- 2) Keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga anak berisiko tidak melanjutkan sekolah atau sering absen.

- 3) Masih adanya anak usia sekolah yang belum terdata atau belum terjangkau layanan pendidikan.
- 4) Perpindahan penduduk (migrasi) yang menyebabkan perubahan jumlah peserta didik.
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di beberapa wilayah.
- 6) Rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan formal.
- 7) Tingginya angka putus sekolah atau tinggal kelas, yang dapat memengaruhi efektivitas layanan pendidikan.

Alternatif Solusi yang Diharapkan dalam peningkatan capaian APK SD yaitu :

1. Meningkatkan pendataan anak usia sekolah secara berkala melalui koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan instansi terkait.
2. Memperluas akses pendidikan dengan pembangunan unit sekolah baru, kelas jauh, atau layanan pendidikan alternatif di daerah sulit dijangkau.
3. Mengoptimalkan program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk mengurangi hambatan biaya.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar dan wajib belajar.
5. Memperkuat kerja sama antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengidentifikasi anak yang belum bersekolah.
6. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan tenaga pendidik agar layanan pendidikan lebih menarik dan berkualitas.
7. Melaksanakan program pencegahan putus sekolah melalui pendampingan siswa berisiko dan pemantauan kehadiran peserta didik.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.46  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Tahun 2025

| Sasaran | Indikator | Capaian | Penyerapan | Tingkat   |
|---------|-----------|---------|------------|-----------|
|         | Kinerja   | Kinerja | Anggaran   | Efisiensi |

|                                              |                                  |       |    |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------|----|------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 88,59 | 99 | 6,69 |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------|----|------|

Efisiensi capaian kinerja =  $88,59\% - 100\% = -11,41\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 99\% = 1\%$

Total Efisiensi =  $-11,41\% + 1\% = -10,41\%$

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 1% dan efisiensi kinerja sebesar -11,41%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -10,41%,. Angka tren negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tidak optimal.

### 3. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, tanpa membedakan usia. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh siswa yang terdaftar di SMP baik yang berada pada usia sekolah dasar maupun di luar usia tersebut—terhadap jumlah penduduk usia resmi SMP, kemudian dinyatakan dalam persentase.

#### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.47  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                 | Target | Realisasi | %     | Predikat |
|----|-----------------------------------|--------|-----------|-------|----------|
| 1  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98,1   | 95,71     | 97,56 | Berhasil |

Capaian APK SMP pada tahun 2025 sebesar 95.71 dari target 98.1 sehingga persentase capaian sebesar 97,56% dengan Kategori berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan jenjang SMP sudah sangat baik dan mendekati target yang direncanakan. Sebagian besar penduduk usia sekolah menengah pertama telah terakomodasi dalam sistem pendidikan, mencerminkan akses layanan yang semakin merata. Capaian tersebut tetap dikategorikan dalam predikat “berhasil”, yang menandakan bahwa program dan kebijakan peningkatan akses pendidikan SMP telah berjalan dengan cukup

efektif. Tingginya angka APK juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah telah terlayani dalam pendidikan SMP, termasuk kemungkinan adanya siswa di luar usia ideal sekolah yang masih mengikuti pendidikan. Secara keseluruhan, kinerja APK SMP menunjukkan hasil yang baik dan stabil, namun masih diperlukan upaya penguatan strategi agar capaian dapat melampaui atau minimal mencapai target yang telah direncanakan pada periode berikutnya.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.48  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  
Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama           | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                   |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | %      | -          | -         | -                   | 98,1       | 95,71     | 97,56               | Berhasil     |

Berdasarkan perhitungan kinerja, tingkat capaian terhadap target adalah sebesar 97,56%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja sudah sangat mendekati target yang telah ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya tercapai.

Capaian tersebut tetap dikategorikan dalam predikat “berhasil”, yang menandakan bahwa program dan kebijakan peningkatan akses pendidikan SMP telah berjalan dengan cukup efektif. Tingginya angka APK juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah telah terlayani dalam pendidikan SMP, termasuk kemungkinan adanya siswa di luar usia ideal sekolah yang masih mengikuti pendidikan.

Secara keseluruhan, kinerja APK SMP menunjukkan hasil yang baik dan stabil, namun masih diperlukan upaya penguatan strategi agar capaian dapat melampaui atau minimal mencapai target yang telah direncanakan pada periode berikutnya.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.49  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Tahun  
Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama           | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | %      | 98,1         | 100,1 | 102,1 | 104,1 | 196,0 | 95,71             | -    | -    | -    | -    |

Dalam RPJMD, target APK SMP direncanakan meningkat secara bertahap dari 98,1% pada tahun 2025 menjadi 104,1% pada tahun 2028, yang mencerminkan upaya peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan SMP. Namun, terdapat angka 196,0% pada tahun 2029 yang tampak tidak selaras dengan tren kenaikan sebelumnya dan kemungkinan merupakan kekeliruan penulisan atau input data, sehingga perlu verifikasi lebih lanjut.

Pada tahun 2025, realisasi APK SMP tercatat sebesar 95,71%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 98,1%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan SMP sudah cukup tinggi, tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Untuk tahun 2026 hingga 2029, data realisasi belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan analisis capaian pada periode tersebut. Meskipun demikian, arah kebijakan RPJMD yang menunjukkan peningkatan target setiap tahun menggambarkan komitmen untuk memperluas akses pendidikan menengah pertama secara berkelanjutan.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- e. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

- f. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- g. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- h. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.778.824.098,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 18.589.147.098,00,- atau sekitar 89%.

Gambar 3.11



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

- Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian :
  1. Adanya peningkatan akses Pendidikan yang dapat mendukung warga usia sekolah dapat memperoleh Pendidikan dengan akses dan jarak yang tidak terlalu jauh serta sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung proses pembelajaran.
  2. Adanya inovasi dari satuan Pendidikan dengan memberikan program unggulan seperti tahfiz dan Pendidikan berbasis islami yang memberikan nilai tambah dalam Pendidikan dasar.
  3. Ada nya bantuan pembiayaan Pendidikan dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh peserta didik sekolah Menengah Pertama.
  4. Adanya bantuan pembiayaan yang diperuntukan kepada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui program ini diharapkan dapat mencegah terjadinya putus sekolah dan dapat memastikan siswa yang kurang mampu dapat terus memperoleh Pendidikan.

5. Ada nya pemahaman dan Kesadaran akan pentingnya Pendidikan Menengah pertama oleh orang tua siswa sehingga dapat mendorong dan mendukung anaknya agar dapat memperoleh pendidikan.
- Sementara untuk faktor penghambat capaian kinerja Angka Partispasi Kasar (APK) SMP adalah sebagai berikut :
    1. Kondisi ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi peserta didik. Siswa yang berasal dari kondisi ekonomi kurang mampu cenderung beresiko putus sekolah karena Kemiskinan menyebabkan orang tua kesulitan memenuhi biaya pendidikan, meskipun sekolah dasar pada dasarnya gratis. Selain itu Biaya tidak langsung seperti seragam, buku, transportasi, dan uang saku masih menjadi beban.
    2. Akses dan infrastruktur sekolah yang belum merata seperti Jarak sekolah yang jauh dari permukiman, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu Kondisi jalan dan transportasi yang kurang memadai sehingga minat sekolah siswa berkurang.
    3. Faktor sosial dan budaya juga menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi peserta didik. Sebagian siswa putus bersekolah karena budaya yang lebih mengutamakan anak bekerja membantu keluarga dibandingkan bersekolah. Selain itu Praktik perkawinan usia dini juga masih terjadi di beberapa daerah sehingga kesempatan peserta didik memperoleh pendidikan tidak optimal.
    4. Faktor kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan dimana kondisi sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai serta kekurangan guru sehingga meningkatkan resiko ketidakhadiran dan putus sekolah.
  - Selanjutnya yang menjadi upaya untuk perbaikan kinerja pelayanan ini adalah :
    - 1) Pemerataan Akses Pendidikan dengan memastikan kondisi akses jalan yang bagus dan satuan pendidikan yang tidak terlalu jauh domisili peserta didik.
    - 2) Meningkatkan mutu Pendidikan dengan pemenuhan 8 Standar pendidikan agar menghasilkan Pendidikan yang berkualitas sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang memilih bersekolah ke daerah lain dengan asumsi bahwa Pendidikan di daerah lain lebih bermutu

- 3) Melakukan intervensi dan memberikan atensi kepada peserta didik yang kurang mampu dengan memberikan kesempatan mendapatkan akses bantuan Pendidikan dari pemerintah pusat berupa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) maupun bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah berupa BOSDA.
- 4) Memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap orang tua mengenai pentingnya Pendidikan
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan melalui pengawas sekolah.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.50  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Angka Partisipasi kasar (APK) SMP Tahun 2025

| Sasaran                                      | Indikator Kinerja                 | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 97,56           | 89                  | 8,56              |

Efisiensi capaian kinerja =  $97,56\% - 100\% = -2,44\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 89\% = 11\%$

Total Efisiensi =  $-2,44 + 11\% = 8,56\%$

Efisiensi kinerja sebesar -2,44% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 11% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 8,56%. Angka positif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP “Berjalan Baik”.

**4. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD 5-6 TAHUN**

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.51  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD  
Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Predikat |
|----|-------------------|--------|-----------|---|----------|
|----|-------------------|--------|-----------|---|----------|

|   |                                    |       |      |       |                |
|---|------------------------------------|-------|------|-------|----------------|
| 1 | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | 51,35 | 39,3 | 76,53 | Cukup Berhasil |
|---|------------------------------------|-------|------|-------|----------------|

Capaian APM PAUD pada tahun 2025 sebesar 39,3 dari target 51,35 sehingga persentase capaian sebesar 76,53% dengan Kategori cukup berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan jenjang PAUD sudah baik dan mendekati target yang direncanakan.

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD menggambarkan tingkat partisipasi anak usia dini yang mengikuti layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan usia yang seharusnya. Pada periode ini, target yang ditetapkan sebesar 51,35%, dengan realisasi sebesar 39,3%.

Berdasarkan capaian tersebut, tingkat kinerja mencapai 76,53% dari target yang direncanakan, sehingga dikategorikan dalam predikat “cukup berhasil”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan PAUD telah berjalan, namun masih belum optimal dalam menjangkau seluruh anak usia dini yang menjadi sasaran.

Realisasi yang masih di bawah target mengindikasikan adanya tantangan dalam perluasan akses dan partisipasi PAUD, baik dari sisi ketersediaan layanan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini, maupun faktor geografis dan sosial ekonomi.

#### b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025

Tabel 3.52  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD  
Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama            | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi   |
|------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
|                                    |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                |
| Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | %      | -          | -         | -                   | 51,35      | 39,3      | 76,53               | Cukup Berhasil |

Pada tahun 2025, target APM PAUD ditetapkan sebesar 51,35%, dengan realisasi sebesar 39,3%. Berdasarkan perhitungan kinerja, capaian yang diperoleh mencapai 76,53% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, interpretasi kinerja berada pada kategori “cukup berhasil”.

Capaian ini menunjukkan bahwa layanan PAUD telah menjangkau sebagian anak usia dini, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya tantangan dalam perluasan akses dan pemerataan layanan PAUD, baik dari sisi ketersediaan satuan pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, maupun faktor geografis dan sosial ekonomi.

- c. **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**  
Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.53

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD  
Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama            | Satuan | Target RPJMD |       |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|------------------------------------|--------|--------------|-------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                                    |        | 2025         | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | %      | 51,35        | 55,50 | 60   | 65,5 | 70   | 39,3              | -    | -    | -    | -    |

Dari table diatas dapat dilihat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD hanya di tahun 2025 sebesar 39,3 hal tersebut dikarenakan periode awal renstra tahun 2025-2029.

- d. **Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.553.179.500,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 2.057.529.326,00 atau sekitar 93,57%, yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- d. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Gambar 3.11  
Kegiatan belajar di satuan pendidikan PAUD



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

**Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

1. Meningkatnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi perkembangan anak.
2. Tersedianya lembaga PAUD yang cukup dan tersebar di berbagai wilayah.
3. Dukungan pemerintah melalui program pembinaan, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan peningkatan mutu layanan PAUD.
4. Adanya keterlibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swasta dalam penyelenggaraan PAUD.
5. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan.
6. Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan akses dan mutu layanan PAUD.

**Faktor Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

1. Masih rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini.
2. Keterbatasan ekonomi keluarga yang menyebabkan anak belum memperoleh layanan PAUD.
3. Belum meratanya ketersediaan lembaga PAUD, terutama di daerah terpencil atau wilayah dengan akses yang sulit.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan PAUD.
5. Masih terdapat anak usia PAUD yang belum terdata atau belum terjangkau layanan pendidikan.

6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan PAUD di beberapa wilayah.

#### Alternatif Solusi yang Diharapkan

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua mengenai manfaat dan pentingnya pendidikan anak usia dini.
2. Memperluas akses layanan PAUD melalui pendirian lembaga PAUD baru atau pengembangan layanan PAUD berbasis masyarakat.
3. Mengoptimalkan bantuan operasional dan dukungan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
4. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta kompetensi pendidik PAUD.
5. Memperkuat pendataan anak usia dini untuk memastikan seluruh sasaran memperoleh akses layanan PAUD.
6. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, satuan PAUD, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengembangan layanan PAUD yang berkualitas dan merata.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.54  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Tahun 2025

| Sasaran                                    | Indikator Kinerja                  | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | 76,53           | 93,57               | -17,04            |

Efisiensi capaian kinerja =  $76,53\% - 100\% = -23,47\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 93,57\% = 6,43\%$

Total Efisiensi =  $-23,47 + 6,43\% = -17,04\%$

Efisiensi kinerja sebesar -23,47% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 6,43% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -17,04%,. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 'Kurang Baik'.

#### 5. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD

Angka Partisipasi Murni (APM) SD merupakan indikator kinerja utama pada periode renstra sebelumnya tahun 2021-2026 dan sudah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

## 6. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP merupakan indikator kinerja utama pada periode renstra sebelumnya tahun 2021-2026 dan sudah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

## 7. RASIO MURID TERHADAP GURU PAUD

Rasio Murid terhadap Guru PAUD adalah indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah guru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kecukupan tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini. tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini.

### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.55

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru PAUD  
Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja              | Target | Realisasi | %     | Predikat |
|----|--------------------------------|--------|-----------|-------|----------|
| 1  | Rasio Murid terhadap Guru PAUD | 11,558 | 11,16     | 96,56 | Berhasil |

Capaian Rasio Murid terhadap Guru PAUD pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,16, lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 11,5. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja mencapai 96,56%, yang termasuk dalam kategori “berhasil”. Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik PAUD telah memadai dan bahkan lebih optimal dari yang direncanakan. Rasio yang lebih rendah dari target mengindikasikan bahwa jumlah murid yang ditangani oleh setiap guru relatif lebih sedikit, sehingga memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih efektif, interaktif, dan memberikan perhatian yang lebih optimal kepada setiap anak

### b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025

Tabel 3.56

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru PAUD

## Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama        | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|--------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Rasio Murid terhadap Guru PAUD | %      | -          | -         | -                   | 11,55      | 11,16     | 96,56               | Berhasil     |

Pada tahun 2024, data target dan realisasi belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun tersebut. Sementara itu, pada tahun 2025, target rasio ditetapkan sebesar 11,55, dengan realisasi sebesar 11,16. Berdasarkan perhitungan kinerja, capaian yang diperoleh mencapai 96,56%, sehingga dikategorikan dalam interpretasi “berhasil”.

Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah murid per guru sudah mendekati kondisi ideal sesuai target yang ditetapkan. Rasio yang lebih rendah atau mendekati target mengindikasikan bahwa beban kerja guru PAUD relatif terkendali, sehingga memungkinkan proses pembelajaran dan pengasuhan anak usia dini dapat berlangsung lebih optimal.

### c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Rasio Murid terhadap Guru PAUD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.57

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru PAUD  
Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama        | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|--------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rasio Murid terhadap Guru PAUD | %      | 11,558       | 12,43 | 13,25 | 14,23 | 15,52 | 11,16             | -    | -    | -    | -    |

Pada tahun 2025, realisasi rasio murid terhadap guru PAUD tercatat sebesar 11,16, yang lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 11,558. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah guru relatif lebih memadai dibandingkan jumlah murid, sehingga beban kerja pendidik berada pada tingkat yang cukup ideal untuk mendukung proses pembelajaran anak usia dini.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap capaian pada periode tersebut. Namun demikian, secara umum capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang baik dalam ketersediaan tenaga pendidik PAUD, meskipun tetap diperlukan perencanaan yang matang agar keseimbangan rasio tetap terjaga sesuai kebutuhan layanan pendidikan di masa mendatang.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Rasio Murid terhadap Guru PAUD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan PAUD. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.764.000.000,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.764.000.000,00,- atau sekitar 100%.

Gambar 3.12  
Bimbingan teknis untuk pendidik tingkat PAUD



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian indikator rasio murid terhadap guru PAUD didukung oleh beberapa factor pendukung diantaranya :

1. Ketersediaan tenaga pendidik PAUD yang memadai sesuai jumlah peserta didik.
2. Dukungan pemerintah daerah dalam pengangkatan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi guru PAUD.

3. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi pendidik PAUD.
4. Adanya program pelatihan dan sertifikasi yang meningkatkan kualitas guru PAUD.
5. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga proses pembelajaran berjalan efektif.

Sementara itu factor menjadi penghambat capaian itu adalah :

1. Jumlah guru PAUD belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah peserta didik.
2. Sebaran guru PAUD yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil atau pedesaan.
3. Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen dan pemberian insentif guru PAUD.
4. Tingginya angka pergantian (turnover) tenaga pendidik akibat kesejahteraan yang masih rendah.
5. Masih terdapat guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Alternatif Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah guru PAUD melalui rekrutmen atau pengangkatan tenaga pendidik sesuai kebutuhan.
2. Mendorong pemerataan distribusi guru PAUD melalui kebijakan penempatan yang lebih efektif.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan insentif guru PAUD untuk mempertahankan tenaga pendidik yang ada.
4. Mengoptimalkan program pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.
5. Memperkuat kerja sama dengan masyarakat, organisasi pendidikan, dan lembaga terkait dalam penyediaan tenaga pendidik PAUD.
6. Melakukan pemetaan kebutuhan guru secara berkala untuk memastikan rasio murid terhadap guru tetap sesuai standar yang ditetapkan.

#### **f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.58  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Rasio Murid terhadap Guru PAUD Tahun 2025

| Sasaran                                      | Indikator Kinerja              | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Rasio Murid terhadap Guru PAUD | 96,56           | 100                 | -3.44             |

Efisiensi capaian kinerja =  $96,56\% - 100\% = -3,44\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 100\% = 0\%$

Total Efisiensi =  $-3,44 + 0\% = -3,44\%$

Efisiensi kinerja sebesar -3,44% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 0% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -3,44%,. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Rasio Murid terhadap Guru PAUD 'Kurang Baik'.

## 8. RASIO MURID TERHADAP GURU SD

Rasio Murid terhadap Guru SD adalah indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah guru pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD). Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kecukupan tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini. tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia sekolah.

### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.59

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru SD Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja            | Target | Realisasi | %     | Predikat        |
|----|------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------|
| 1  | Rasio Murid terhadap Guru SD | 13     | 12,38     | 95,23 | Sangat Berhasil |

Pada periode ini, target rasio murid terhadap guru SD ditetapkan sebesar 13, dengan realisasi sebesar 12,38. Berdasarkan perhitungan kinerja, capaian mencapai 95,23%, sehingga dikategorikan dalam predikat "sangat berhasil".

Capaian tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru yang tersedia relatif sudah memadai dalam melayani peserta didik di jenjang SD. Rasio yang sedikit lebih rendah dari target

mengindikasikan beban kerja guru berada pada kondisi yang cukup ideal, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan optimal

Namun demikian, secara substantif rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa jumlah murid yang ditangani setiap guru masih relatif besar dibandingkan kondisi ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa beban mengajar guru masih cukup tinggi dan berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembelajaran.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.60

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru SD Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama      | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi    |
|------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|
|                              |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                 |
| Rasio Murid terhadap Guru SD | %      | -          | -         | -                   | 13         | 12,38     | 95,23               | Sangat Berhasil |

Pada tahun 2024, data target dan realisasi belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja. Sementara itu, pada tahun 2025, target rasio murid terhadap guru SD ditetapkan sebesar 13, dengan realisasi sebesar 12,38. Berdasarkan hasil penghitungan, capaian kinerja mencapai 95,23%, dan dikategorikan dalam interpretasi “sangat berhasil”.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan guru di tingkat SD sudah relatif memadai dalam melayani peserta didik. Rasio realisasi yang lebih rendah dari target mengindikasikan beban kerja guru berada pada kondisi yang cukup ideal, sehingga mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, kondusif, dan berkualitas.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dalam pemenuhan rasio murid terhadap guru SD. Namun demikian, upaya pemeliharaan dan pemerataan distribusi guru tetap diperlukan agar kualitas layanan pendidikan dasar dapat terus terjaga dan merata di seluruh wilayah.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru SD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.61

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru SD  
Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama      | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                              |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rasio Murid terhadap Guru SD | %      | 13           | 15   | 17   | 19   | 20   | 12,38             |      | -    | -    | -    |

Dari table diatas dapat dilihat capaian Rasio Murid terhadap Guru SD hanya di tahun 2025 sebesar 12,38 hal tersebut dikarenakan periode awal renstra tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, realisasi rasio murid terhadap guru SD tercatat sebesar 12,38, yang lebih rendah dibandingkan target sebesar 13. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru relatif masih memadai, dengan beban kerja guru yang berada pada tingkat cukup ideal untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia, sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap capaian pada periode tersebut. Secara umum, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang baik dalam pemenuhan rasio murid terhadap guru SD, namun tetap diperlukan perencanaan yang berkelanjutan agar distribusi guru tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan layanan pendidikan di masa mendatang.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Rasio Murid terhadap Guru SD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan SD. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.338.887.000,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.091.350.000,00,- atau sekitar 96,63%.

Gambar 13

Kegiatan MGMP pendidik tingkat SD



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian indikator rasio murid terhadap guru SD didukung oleh beberapa factor pendukung diantaranya :

1. Ketersediaan jumlah guru SD yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik.
2. Adanya kebijakan pemerintah dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik.
3. Dukungan anggaran untuk pengangkatan dan peningkatan kompetensi guru.
4. Sistem pendataan pendidikan yang baik sehingga kebutuhan guru dapat dipetakan secara akurat.
5. Tingginya komitmen guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan.

Sementara itu faktor yang menjadi penghambat capaian itu adalah :

1. Jumlah guru yang belum sebanding dengan jumlah murid di beberapa sekolah.
2. Sebaran guru yang belum merata, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.
3. Tingginya angka pensiun guru yang tidak diimbangi dengan penambahan tenaga pendidik baru.
4. Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen dan pemenuhan kebutuhan guru.
5. Perpindahan atau mutasi guru yang menyebabkan kekurangan guru pada sekolah tertentu.
6. Meningkatnya jumlah peserta didik pada wilayah tertentu yang tidak diikuti penambahan guru.

Adapun Alternatif Solusi yang Diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rekrutmen dan penempatan guru sesuai hasil analisis kebutuhan guru di setiap sekolah.
2. Meningkatkan pemerataan distribusi guru melalui kebijakan redistribusi dan penataan tenaga pendidik.
3. Mengusulkan pemenuhan formasi guru melalui ASN maupun PPPK sesuai kebutuhan daerah.
4. Melakukan pemetaan kebutuhan guru secara berkala berdasarkan perkembangan jumlah peserta didik.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya guru melalui penugasan tambahan dan pengaturan beban kerja yang proporsional.
6. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi guru

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.62  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Rasio Murid terhadap Guru SD Tahun 2025

| Sasaran                                      | Indikator Kinerja            | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Rasio Murid terhadap Guru SD | 95,23           | 96,63               | -1,4              |

Efisiensi capaian kinerja =  $95,23\% - 100\% = -4,77\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 96,63\% = 3,37\%$

Total Efisiensi =  $-4,77 + 3,37\% = -1,4\%$

Efisiensi kinerja sebesar% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 3,37% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 204,37%,. Angka positif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Rasio Murid terhadap Guru PAUD “sangat Baik”.

**9. RASIO MURID TERHADAP GURU SMP**

Rasio Murid terhadap Guru SMP adalah indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah peserta didik dengan jumlah guru pada satuan Pendidikan SMP. Rasio ini digunakan

untuk menilai tingkat kecukupan tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini. tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia sekolah.

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.63

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru SMP Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja             | Target | Realisasi | %    | Predikat |
|----|-------------------------------|--------|-----------|------|----------|
| 1  | Rasio Murid terhadap Guru SMP | 14     | 13,37     | 95,5 | Berhasil |

Capaian Rasio Murid terhadap Guru SMP pada tahun 2025 tercatat sebesar 13,37, lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 14. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja mencapai 95,5%, yang termasuk dalam kategori “berhasil”.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan guru pada jenjang SMP sudah relatif memadai dalam melayani peserta didik. Rasio realisasi yang sedikit lebih rendah dari target mengindikasikan bahwa beban kerja guru berada pada kondisi yang cukup ideal, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan kondusif.

Secara keseluruhan, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang baik, namun tetap diperlukan upaya menjaga keseimbangan distribusi guru agar kualitas layanan pendidikan di tingkat SMP dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara merata. Namun demikian, secara substantif rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa jumlah murid yang ditangani setiap guru masih relatif besar dibandingkan kondisi ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa beban mengajar guru masih cukup tinggi dan berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembelajaran.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.64

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru SMP Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|-------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                         |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |

|                               |   |   |   |   |    |       |        |                 |
|-------------------------------|---|---|---|---|----|-------|--------|-----------------|
| Rasio Murid terhadap Guru SMP | % | - | - | - | 14 | 13,37 | 319,85 | Sangat Berhasil |
|-------------------------------|---|---|---|---|----|-------|--------|-----------------|

Pada tahun 2024, data target dan realisasi belum tersedia sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja. Sementara itu, pada tahun 2025, target rasio murid terhadap guru SMP ditetapkan sebesar 14, dengan realisasi sebesar 13,37. Berdasarkan hasil penghitungan, capaian kinerja tercatat sebesar 319,85%, dengan interpretasi “sangat berhasil”.

Namun demikian, angka capaian persentase tersebut perlu dicermati karena secara logika perhitungan rasio, nilai realisasi yang mendekati target seharusnya menghasilkan capaian sekitar 95%, bukan 319,85%. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya kesalahan dalam metode perhitungan atau penulisan data capaian kinerja yang perlu diverifikasi kembali. Secara substansi, realisasi rasio 13,37 yang lebih rendah dari target 14 menunjukkan bahwa ketersediaan guru pada jenjang SMP relatif memadai, sehingga beban kerja guru berada pada kondisi yang cukup ideal untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, secara kualitatif kinerja dapat dinilai baik, meskipun secara kuantitatif perlu dilakukan koreksi terhadap nilai persentase capaian agar sesuai dengan kaidah perhitungan yang benar.

- c. **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**  
Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru SMP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.65

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Murid terhadap Guru SMP  
Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama       | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                               |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rasio Murid terhadap Guru SMP | %      | 14           | 16   | 18   | 19   | 20   | 13,37             |      | -    | -    | -    |

Dalam RPJMD, target rasio murid terhadap guru SMP direncanakan meningkat secara bertahap dari 14 pada tahun 2025 menjadi 20 pada tahun 2029. Peningkatan target ini mencerminkan adanya proyeksi penyesuaian kebutuhan layanan pendidikan seiring dengan

dinamika jumlah peserta didik dan kebijakan pemerataan serta efisiensi pemanfaatan tenaga pendidik.

Pada tahun 2025, realisasi rasio murid terhadap guru SMP tercatat sebesar 13,37, yang lebih rendah dibandingkan target sebesar 14. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru relatif masih memadai, sehingga beban kerja guru berada pada tingkat yang cukup ideal untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan evaluasi capaian pada periode tersebut. Secara umum, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang baik dalam pemenuhan rasio murid terhadap guru SMP, namun tetap diperlukan perencanaan dan pengelolaan distribusi guru yang berkelanjutan agar kualitas layanan pendidikan dapat terus terjaga sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Rasio Murid terhadap Guru SMP adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan SMP. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.464.000.000,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.359.000.000,00,- atau sekitar 92,83%.

**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian indikator rasio murid terhadap guru SD didukung oleh beberapa factor pendukung diantaranya :

Faktor Pendukung

1. Ketersediaan jumlah guru SMP yang relatif memadai sesuai kebutuhan peserta didik.
2. Dukungan pemerintah melalui kebijakan pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik.
3. Adanya program peningkatan kompetensi guru yang mendukung kualitas pembelajaran.
4. Ketersediaan data pendidikan yang akurat untuk perencanaan kebutuhan guru.

5. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang membantu efektivitas proses belajar mengajar.

#### Faktor Penghambat

1. Jumlah guru belum sebanding dengan jumlah murid pada beberapa sekolah SMP.
2. Distribusi guru yang belum merata antarwilayah dan antarsekolah.
3. Kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu akibat pensiun, mutasi, atau keterbatasan formasi.
4. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan guru.
5. Peningkatan jumlah peserta didik yang tidak diikuti dengan penambahan tenaga pendidik.
6. Penempatan guru yang belum sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan riil sekolah.

#### Alternatif Solusi yang Diharapkan

1. Melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan guru SMP secara berkala.
2. Mengusulkan penambahan formasi guru melalui rekrutmen ASN atau PPPK sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan pemerataan dan redistribusi guru antar sekolah yang mengalami kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan guru yang tersedia sesuai kompetensi dan beban kerja.
5. Memberikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil atau wilayah yang kekurangan guru.
6. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam perencanaan kebutuhan guru.
7. Mengembangkan program peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru untuk mendukung efektivitas pembelajaran.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.66  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Rasio Murid terhadap Guru SMP Tahun 2025

| Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|---------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|

|                                              |                               |      |       |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Rasio Murid terhadap Guru SMP | 95,5 | 92,83 | 2,67 |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|------|

Efisiensi capaian kinerja =  $95,5\% - 100\% = -4,5\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 92,83\% = 7,17\%$

Total Efisiensi =  $-4,5\% + 7,17\% = 2,67\%$

Efisiensi kinerja sebesar 95,5% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 7,1% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 2,67,. Angka positif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Rasio Murid terhadap Guru PAUD “sangat Baik”.

## 10. PERSENTASE ANAK TIDAK SEKOLAH

Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan formal. Indikator ini menunjukkan seberapa besar penurunan jumlah anak atau remaja yang tidak bersekolah dibandingkan periode sebelumnya.

### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.67

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Anak tidak sekolah Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja             | Target | Realisasi | %     | Predikat       |
|----|-------------------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 1  | Persentase Anak tidak sekolah | 6,5    | 7,17      | 89,69 | Cukup Berhasil |

Capaian persentase penurunan anak tidak sekolah pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,17%, dari target sebesar 6,5%. Dengan rumus perhitungan :

$$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} = \frac{(2 \times 6,5) - 7,17}{6,5} = 89,69$$

Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja mencapai 89,69%, yang termasuk dalam kategori “cukup berhasil”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan jumlah anak tidak sekolah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun telah terjadi penurunan jumlah anak tidak sekolah dibandingkan periode sebelumnya, hasil yang dicapai masih berada di bawah harapan sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk

menjangkau dan mengembalikan anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah bersekolah ke dalam sistem pendidikan..

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.68

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Persentase Anak tidak sekolah Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama       | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi   |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
|                               |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                |
| Persentase Anak tidak sekolah | %      | -          | -         | -                   | 6,5        | 7,17      | 89,69               | Cukup Berhasil |

Berdasarkan perhitungan kinerja, capaian indikator ini sebesar 89,69%, dengan interpretasi “cukup berhasil”. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan angka anak tidak sekolah telah berjalan, namun belum optimal dan masih memerlukan penguatan kebijakan serta intervensi yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan akses pendidikan, penguatan program wajib belajar, serta penjangkauan anak-anak yang rentan tidak bersekolah agar target penurunan angka anak tidak sekolah dapat tercapai pada periode berikutnya.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator persentase penurunan anak tidak sekolah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.69

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio Persentase Anak tidak sekolah Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama       | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                               |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase Anak tidak sekolah | %      | 6,5          | 6,2  | 5,9  | 5,5  | 5,3  | 7,17              |      | -    | -    | -    |

Dari table diatas dapat dilihat capaian persentase penurunan anak tidak sekolah hanya di tahun 2025 sebesar 9,65. Hal tersebut dikarenakan periode awal renstra tahun 2025-2029.

d. **Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian persentase penurunan anak tidak sekolah adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non formal kesetaraan dengan penyediaan pendidikan paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA) yang menjadi alternatif bagi anak putus sekolah untuk kembali mendapatkan hak pendidikannya.. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.897.209.500,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.064.427.286,00,- atau sekitar 56,10%.



Gambar 3.13

Kegiatan verifikasi data anak tidak sekolah

e. **Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian indikator persentase penurunan anak tidak sekolah oleh beberapa factor pendukung diantaranya :

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui berbagai program peningkatan akses dan layanan pendidikan.
2. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendorong pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.
3. Ketersediaan program pendidikan formal dan nonformal, seperti pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
4. Kerja sama lintas sektor, antara perangkat daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa/nagari, dan masyarakat dalam upaya pendataan serta penanganan ATS.
5. Adanya bantuan pendidikan dan program perlindungan sosial, yang membantu mengurangi hambatan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.

Sementara itu yang menjadi Faktor Penghambat dari persentase penurunan anak tidak sekolah adalah sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi keluarga yang masih rendah, sehingga sebagian anak terpaksa bekerja atau membantu orang tua dan tidak melanjutkan pendidikan.
2. Rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan, terutama pada keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah.
3. Tingginya mobilitas dan perpindahan penduduk, yang menyebabkan data anak tidak sekolah sulit diperbarui secara akurat dan berkelanjutan.
4. Faktor geografis dan aksesibilitas, terutama bagi anak yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan sarana transportasi menuju sekolah.
5. Terjadinya putus sekolah akibat faktor sosial dan keluarga, seperti pernikahan usia dini, masalah keluarga, atau kurangnya motivasi belajar.
6. Belum optimalnya validasi dan pemutakhiran data ATS, sehingga proses penjangkauan dan intervensi belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Alternatif Solusi yang dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data ATS secara berkala melalui koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa/nagari, dan masyarakat.
2. Melaksanakan program penjangkauan dan pendampingan khusus bagi anak yang berisiko putus sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah.
3. Memperluas akses layanan pendidikan alternatif, seperti pendidikan kesetaraan, sekolah terbuka, dan program pembelajaran fleksibel sesuai kebutuhan anak.
4. Meningkatkan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, baik melalui beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, maupun dukungan transportasi.
5. Mengintensifkan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan dampak negatif anak tidak sekolah terhadap masa depan anak.
6. Memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi sosial, kependudukan, perlindungan anak, dan pemerintah desa/nagari untuk menangani faktor-faktor penyebab ATS secara terpadu.
7. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan anak yang telah kembali bersekolah dapat terus mengikuti proses pendidikan hingga tuntas.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.70  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Persentase penurunan Anak tidak sekolah Tahun 2025

| Sasaran                                      | Indikator Kinerja             | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Persentase Anak tidak sekolah | 89,69           | 56,10               | 33,59%            |

Efisiensi capaian kinerja =  $89,69\% - 100\% = -10,31\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 56,10\% = 43,90\%$

Total Efisiensi =  $-10,31\% + 43,90\% = 33,59\%$

Efisiensi kinerja sebesar -10,31% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 43,90% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 33,59%,. Angka positif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian persentase anak tidak sekolah cukup baik.

## 11. RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH PAUD TERHADAP PENDUDUK USIA PAUD

Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibandingkan dengan jumlah anak pada kelompok usia PAUD di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan seberapa memadai daya tampung layanan PAUD dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini.

### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.71

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                                           | Target | Realisasi | %     | Predikat |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------|
| 1  | Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD | 0,0201 | 0,0193    | 96,01 | Berhasil |

Capaian Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,0193 dari target sebesar 0,0201. Dengan demikian, tingkat pencapaian

kinerja mencapai 96,01%, yang termasuk dalam kategori “ Berhasil”. Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) telah mendekati target yang ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi relatif kecil, yaitu sebesar 0,0003 poin, sehingga secara umum kebutuhan layanan PAUD bagi penduduk usia PAUD telah dapat dipenuhi dengan baik. Tingginya persentase capaian mengindikasikan adanya upaya yang efektif dalam menjaga ketersediaan lembaga PAUD, baik melalui pendirian satuan pendidikan baru maupun optimalisasi lembaga yang telah ada

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.72

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama                                     | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                                             |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |              |
| Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD | %      | -          | -         | -                   | 0,0201     | 0,0193    | 96,01               | Berhasil     |

Pada tahun 2024, data target dan realisasi belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja. Sementara itu, pada tahun 2025, target rasio ditetapkan sebesar 0,0201, dengan realisasi sebesar 0,0193. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja mencapai 96,01%, sehingga dikategorikan dalam interpretasi “berhasil”.

Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan PAUD sudah relatif mendekati target yang direncanakan, meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dalam pemenuhan daya tampung dibandingkan jumlah anak usia PAUD. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan PAUD telah cukup tersedia, namun masih perlu penambahan atau optimalisasi satuan pendidikan untuk menjangkau seluruh sasaran secara lebih merata.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dalam pemenuhan ketersediaan sekolah PAUD, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas layanan agar dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan penduduk usia PAUD di masa mendatang.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.73

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama                                     | Satuan | Target RPJMD |        |        |        |        | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                             |        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD | %      | 0,0201       | 0,0220 | 0,0231 | 0,0245 | 0,0253 | 0,0193            |      | -    | -    | -    |

Pada tahun 2025, realisasi rasio ketersediaan sekolah PAUD tercatat sebesar **0,0193**, yang sedikit lebih rendah dibandingkan target sebesar **0,0201**. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan PAUD masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal berdasarkan jumlah penduduk usia PAUD, meskipun selisihnya relatif kecil.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan evaluasi capaian pada periode tersebut. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup baik namun masih memerlukan penambahan dan optimalisasi satuan pendidikan PAUD agar dapat memenuhi target RPJMD secara bertahap dan mendukung pemerataan akses pendidikan anak usia dini.

d. **Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan SMP. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 493.320.000,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 484.583.661,- atau sekitar 98,22%.

**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian indikator ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD didukung oleh beberapa factor pendukung diantaranya :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan layanan PAUD, baik melalui dukungan kebijakan, program, maupun penganggaran.
2. Partisipasi masyarakat dan penyelenggara PAUD swasta yang turut berperan dalam menyediakan layanan pendidikan anak usia dini.
3. Meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga mendorong keberlangsungan dan pengembangan lembaga PAUD.
4. Kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan, seperti pemerintah nagari/desa, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan PAUD.

Faktor Penghambat yang menyebabkan kegagalan capaian Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk usia PAUD yang tidak sebanding dengan penambahan satuan PAUD, sehingga rasio ketersediaan sekolah belum mencapai target secara optimal.
2. Belum meratanya distribusi lembaga PAUD, terutama di wilayah terpencil atau daerah dengan aksesibilitas yang masih terbatas.
3. Keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (pendidik PAUD) yang dapat menghambat pengembangan layanan baru.
4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan, pengembangan, dan peningkatan kualitas satuan PAUD.

Alternatif Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pendirian dan pengembangan satuan PAUD baru pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan pendidikan anak usia dini.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia melalui rehabilitasi, peningkatan fasilitas, dan pengelolaan yang lebih efektif.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan, pendampingan, dan program pengembangan profesional berkelanjutan.
4. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa/nagari, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung penyediaan layanan PAUD.

5. Melakukan pemetaan kebutuhan layanan PAUD secara berkala untuk memastikan pemerataan akses dan sebagai dasar perencanaan penambahan satuan pendidikan sesuai kebutuhan wilayah.
6. Mengoptimalkan alokasi anggaran dan sumber pendanaan lainnya guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas layanan PAUD.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.74  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD Tahun 2025

| Sasaran                                      | Indikator Kinerja                                           | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD | 96,01           | 98,22               | -2,21             |

Efisiensi capaian kinerja =  $96,01\% - 100\% = -3,99\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 98,22\% = 1,78\%$

Total Efisiensi =  $-3,99\% + 1,78\% = -2,21\%$

Efisiensi kinerja sebesar -3,99% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 1,78% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -2,21%,. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD tidak berjalan optimal.

**12. RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SD TERHADAP PENDUDUK USIA SD**

Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan jumlah satuan Pendidikan Sekolah Dasar dibandingkan dengan jumlah anak pada kelompok usia SD di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan seberapa memadai daya tampung layanan SD dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar.

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.75  
Perbandingan Target dan Realisasi Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap

## penduduk usia SD Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                                       | Target | Realisasi | %     | Predikat       |
|----|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 1  | Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD | 0,0098 | 0,0088    | 89,79 | Cukup Berhasil |

Capaian Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD sebesar 0.0088 dengan target 0.0098 sehingga persentase capaian nya sebesar 89,79% dengan kategori tidak berhasil. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan SD belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan penduduk usia sekolah. Adanya selisih antara realisasi dan target mengindikasikan masih terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan daya tampung layanan pendidikan dasar, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan SD masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tampung sekolah dasar belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah penduduk usia SD, meskipun selisihnya tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya penambahan dan pemerataan satuan pendidikan SD serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, agar akses pendidikan dasar dapat semakin merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025

Tabel 3.76

Perbandingan Target dan Realisasi Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama                                 | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi   |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
|                                                         |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                |
| Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD | %      | -          | -         | -                   | 0,0098     | 0,0088    | 89,79               | Cukup Berhasil |

Pada tahun 2024, data target dan realisasi belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja pada periode tersebut. Sementara itu, pada tahun 2025, target rasio ketersediaan sekolah SD ditetapkan sebesar 0,0098, dengan realisasi sebesar 0,0088.

Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja mencapai 89,79%, sehingga dikategorikan dalam interpretasi “cukup berhasil”.

Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan SD masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa daya tampung sekolah dasar belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah penduduk usia SD, meskipun selisihnya relatif tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya penguatan berupa penambahan dan pemerataan satuan pendidikan SD serta optimalisasi sarana dan prasarana yang ada agar akses pendidikan dasar dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**  
Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.77

Perbandingan Target dan Realisasi Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

Dari table diatas dapat dilihat capaian Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk

| Indikator Kinerja Utama                                 | Satuan | Target RPJMD |        |        |        |        | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                         |        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD | %      | 0,0098       | 0,0110 | 0,0123 | 0,0137 | 0,0151 | 0,0088            |      | -    | -    | -    |

Pada tahun 2025, realisasi rasio ketersediaan sekolah SD tercatat sebesar 0,0088, yang masih berada di bawah target sebesar 0,0098. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan SD belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ideal berdasarkan jumlah penduduk usia SD, meskipun selisihnya relatif kecil.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan evaluasi capaian pada periode tersebut. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan berupa penambahan dan pemerataan satuan pendidikan SD serta optimalisasi fasilitas yang ada agar target RPJMD dapat tercapai secara bertahap.

- d. **Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan :

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 3) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.355.133.418,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 3.768.204.091,00,- atau sekitar 86,52%.

Gambar 3.14  
Monitoring sarana dan prasarana di satuan pendidikan SD



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian indikator Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD didukung oleh beberapa Faktor yaitu :

1. Ketersediaan jaringan sekolah dasar yang cukup luas sehingga dapat menjangkau sebagian besar wilayah pelayanan pendidikan.

2. Dukungan pemerintah daerah melalui program pembangunan dan rehabilitasi sekolah, yang membantu menjaga ketersediaan sarana pendidikan dasar.
3. Adanya kebijakan wajib belajar dan peningkatan akses pendidikan dasar, sehingga penyediaan sekolah menjadi prioritas pembangunan daerah.
4. Partisipasi masyarakat dan komite sekolah dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dasar.
5. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Faktor Penghambat yang menyebabkan kegagalan capaian Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD :

1. Pertumbuhan dan persebaran penduduk usia SD yang tidak merata, menyebabkan kebutuhan sekolah di beberapa wilayah meningkat lebih cepat dibandingkan ketersediaan sekolah.
2. Kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil, kepulauan, atau wilayah dengan akses transportasi terbatas.
3. Keterbatasan anggaran pembangunan unit sekolah baru, terutama pada daerah yang membutuhkan penambahan ruang belajar atau sekolah baru.
4. Masih terdapat sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga kapasitas layanan pendidikan belum optimal.
5. Perubahan demografi dan mobilitas penduduk, yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah anak usia SD pada beberapa wilayah.

Alternatif Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan sekolah dasar secara berkala untuk mengetahui wilayah yang memerlukan penambahan unit sekolah atau ruang kelas baru.
2. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar melalui pembangunan sekolah baru atau penambahan ruang kelas di daerah dengan tingkat kebutuhan tinggi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sekolah yang sudah ada melalui pengaturan wilayah layanan dan peningkatan kapasitas daya tampung sekolah.

4. Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sarana-prasarana sekolah guna mendukung kualitas dan kapasitas layanan pendidikan.
5. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung penyediaan layanan pendidikan dasar yang merata.
6. Mengembangkan kebijakan khusus untuk wilayah terpencil dan sulit dijangkau, termasuk penyediaan sekolah satu atap atau model layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi wilayah

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.78  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD Tahun 2025

| Sasaran                                      | Indikator Kinerja                                       | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD | 66,66           | 86,52               | -19,86            |

Efisiensi capaian kinerja =  $66,66\% - 100\% = -33,34\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 86,52\% = 13,48\%$

Total Efisiensi =  $-33,34\% + 13,48\% = -19,86\%$

Efisiensi kinerja sebesar -33,34% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 13,48% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar -19,86%,. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD 'Kurang Baik'.

**13. RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH SMP TERHADAP PENDUDUK USIA SMP**

Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan jumlah satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibandingkan dengan jumlah anak pada kelompok usia SMP di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan seberapa memadai daya tampung layanan SMP dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar.

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.79  
Perbandingan Target dan Realisasi Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                                         | Target | Realisasi | %     | Predikat       |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 1  | Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP | 0,0028 | 0,0024    | 85,71 | Cukup Berhasil |

Capaian Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP sebesar 0.0042 dengan target 0.0028 sehingga persentase capaian nya sebesar 85,71% dengan kategori Tidak berhasil. Ketidaktercapaian ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam penyediaan daya tampung layanan pendidikan SMP, baik dari sisi jumlah unit sekolah maupun pemerataan sebaran lokasi sekolah. Akibatnya, sebagian penduduk usia SMP belum sepenuhnya terlayani oleh fasilitas pendidikan yang tersedia.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan SMP masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tampung sekolah menengah pertama belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah penduduk usia SMP, meskipun selisihnya tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya penambahan dan pemerataan satuan pendidikan SMP serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada agar akses pendidikan menengah pertama dapat semakin merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

Tabel 3.80  
Perbandingan Target dan Realisasi Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP Tahun 2024 dan 2025

| Indikator Kinerja Utama                                   | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi   |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
|                                                           |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                |
| Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP | %      | -          | -         | -                   | 0,0028     | 0,0024    | 85,71               | Cukup Berhasil |

Pada tahun 2024, data target dan realisasi belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja pada periode tersebut. Sementara itu, pada tahun 2025, target rasio ketersediaan sekolah SMP ditetapkan sebesar 0,0028, dengan realisasi sebesar

0,0024. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja mencapai 85,71%, sehingga dikategorikan dalam interpretasi “cukup berhasil”.

Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan SMP masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa daya tampung sekolah menengah pertama belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah penduduk usia SMP, meskipun selisihnya relatif tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan berupa penambahan dan pemerataan satuan pendidikan SMP serta optimalisasi sarana dan prasarana yang ada agar akses pendidikan menengah pertama dapat semakin merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**  
Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.81

Perbandingan Target dan Realisasi Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama                                   | Satuan | Target RPJMD |        |        |        |        | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                           |        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP | %      | 0,0028       | 0,0035 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0068 | 0,0024            |      | -    | -    | -    |

Dalam Renstra 2025-2029, target rasio ketersediaan sekolah SMP direncanakan meningkat secara bertahap dari 0,0028 pada tahun 2025 menjadi 0,0068 pada tahun 2029. Peningkatan target ini menunjukkan adanya arah kebijakan untuk memperluas ketersediaan satuan pendidikan SMP seiring dengan upaya pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar menengah.

Pada tahun 2025, realisasi rasio ketersediaan sekolah SMP tercatat sebesar 0,0024, yang masih berada di bawah target sebesar 0,0028. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan SMP belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ideal berdasarkan jumlah penduduk usia SMP, meskipun selisihnya relatif kecil.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan evaluasi capaian pada periode tersebut. Secara umum, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan berupa penambahan dan pemerataan satuan pendidikan SMP serta optimalisasi sarana dan prasarana yang ada agar target RPJMD dapat tercapai secara bertahap dan merata.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan :

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 820.000.000,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 797.373.753,00,- atau sekitar 97,24%.

Gambar 3.16

Monitoring sarana dan prasarana di satuan pendidikan SMP



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian indikator Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD didukung oleh beberapa Faktor yaitu :

1. Ketersediaan sekolah SMP negeri dan swasta yang telah tersebar di sebagian besar wilayah sehingga dapat melayani kebutuhan pendidikan penduduk usia SMP.
2. Dukungan kebijakan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan menengah pertama melalui pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas layanan.
3. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah yang mendukung pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan fasilitas sekolah.
4. Partisipasi masyarakat dan penyelenggara pendidikan swasta dalam penyediaan layanan pendidikan tingkat SMP.
5. Program wajib belajar dan peningkatan angka partisipasi sekolah, yang mendorong tersedianya layanan pendidikan yang lebih luas dan merata.

Faktor Penghambat yang menyebabkan kegagalan capaian Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP :

1. Sebaran penduduk usia SMP yang tidak merata, sehingga di beberapa wilayah terjadi ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah peserta didik potensial.
2. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, terutama pada daerah terpencil, perbukitan, atau wilayah dengan jaringan transportasi yang terbatas.
3. Keterbatasan jumlah sekolah atau ruang kelas baru pada wilayah yang mengalami peningkatan jumlah penduduk usia SMP.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, yang memengaruhi kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik.
5. Keterbatasan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya pada daerah yang sulit dijangkau.

Alternatif Solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan layanan pendidikan SMP secara berkala sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pemerataan sekolah.

2. Menambah unit sekolah baru atau ruang kelas baru pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk usia SMP tinggi dan daya tampung sekolah yang terbatas.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana-prasarana sekolah, termasuk rehabilitasi bangunan dan penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran.
4. Memperkuat pemerataan distribusi tenaga pendidik, terutama pada daerah terpencil dan wilayah yang masih kekurangan guru.
5. Mengembangkan pola layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi wilayah, seperti sekolah satu atap atau penguatan layanan transportasi bagi peserta didik.
6. Meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah desa/nagari, dan sektor swasta dalam mendukung penyediaan dan pengembangan layanan pendidikan SMP.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.82  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP Tahun 2025

| Sasaran                                      | Indikator Kinerja                                         | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP | 85,71           | 97,24               | -11,53            |

Efisiensi capaian kinerja =  $85,71\% - 100\% = -14,29\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 97,24\% = 2,76\%$

Total Efisiensi =  $-14,29\% + 2,76\% = -11,53\%$

Efisiensi kinerja sebesar  $-14,29\%$  dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar  $2,76\%$  dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar  $-11,53\%$ . Angka negatif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP tidak efisien.

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>Sasaran 4 :</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|  |                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Meningkatnya kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan objek diduga cagar budaya |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1. Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya

Upaya meningkatkan kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) merupakan langkah penting dalam menjaga, mendokumentasikan, dan melindungi kekayaan budaya daerah agar tidak hilang atau rusak seiring perkembangan zaman.

#### a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.83

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                                                     | Target | Realisasi | %     | Predikat       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 1  | Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya | 66     | 57,14     | 86,57 | Cukup Berhasil |

Capaian Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya pada tahun 2025 adalah sebesar 57,14% dengan target 66% sehingga persentase capaiannya menjadi 86,57% dengan predikat ‘cukup Berhasil’. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dalam upaya pelestarian dan perlindungan warisan budaya daerah. Inventarisasi yang dilakukan secara menyeluruh menjadi dasar penting bagi penetapan, pengelolaan, dan pelestarian cagar budaya di masa mendatang.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan inventarisasi warisan budaya dan ODCB telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat kendala dalam proses pendataan, verifikasi, maupun keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh objek budaya yang ada.

Secara keseluruhan, kinerja tahun ini menunjukkan hasil yang cukup baik dalam upaya pelestarian budaya daerah. Namun demikian, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas petugas, serta optimalisasi kegiatan inventarisasi agar seluruh warisan budaya dan ODCB dapat terdata secara lebih lengkap dan akurat sesuai target yang telah ditetapkan.

#### b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025

Tabel 3.84

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya Tahun 2024 dan 2025

| c                                                                     | Satuan | Tahun 2024 |           |                     | Tahun 2025 |           |                     | Interpretasi   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|
|                                                                       |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |                |
| Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya | %      | -          | -         | -                   | 66         | 57,14     | 86,57               | Cukup Berhasil |

Pada tahun 2024, data target dan realisasi belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja pada periode tersebut. Sementara itu, pada tahun 2025, target inventarisasi ditetapkan sebesar 66%, dengan realisasi sebesar 57,14%. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja mencapai 86,57%, sehingga dikategorikan dalam interpretasi “cukup berhasil”.

Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan inventarisasi warisan budaya dan ODCB telah berjalan, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan masih adanya kendala dalam proses pendataan, verifikasi lapangan, maupun keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh objek yang berpotensi menjadi cagar budaya.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dalam upaya pelestarian budaya daerah, namun masih diperlukan penguatan strategi, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi kegiatan inventarisasi agar seluruh warisan budaya dan ODCB dapat terdata secara lengkap dan akurat sesuai target yang telah direncanakan.

**c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator capaian Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.85

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama                                               | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                                       |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya | %      | 66,00        | 67,00 | 69,00 | 81,00 | 85,00 | 57,14             |      | -    | -    | -    |

Pada tahun 2025, realisasi inventarisasi tercatat sebesar 57,14%, yang masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 66,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh objek yang menjadi sasaran pendataan.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap capaian pada periode tersebut. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta optimalisasi kegiatan pendataan agar target inventarisasi warisan budaya dan ODCB dapat tercapai secara bertahap sesuai Renstra.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya adalah Program program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan program pembinaan sejarah yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan :

- 1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
- 2) Penetapan Cagar Budaya
- 3) Pelindungan Cagar Budaya
- 4) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 535.242.500,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 136.105.787,00,- atau sekitar 25%.

Gambar 3.17

Penghargaan terhadap WBTB Padang Pariaman (tradisi Maniliak bulan, Malacuik Marapulai dan Indang Tigo Sandiang)



**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya didukung oleh beberapa Faktor yaitu :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan melalui program pendataan, dokumentasi, dan perlindungan warisan budaya serta objek diduga cagar budaya.
2. Tingginya potensi warisan budaya yang dimiliki daerah, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, maupun warisan budaya takbenda yang menjadi objek inventarisasi.
3. Dukungan masyarakat, tokoh adat, dan pemerhati budaya dalam memberikan informasi dan data terkait keberadaan warisan budaya di wilayahnya.
4. Adanya regulasi dan kebijakan pelestarian cagar budaya yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan inventarisasi.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi data yang memudahkan proses pendataan, dokumentasi, dan pengelolaan informasi warisan budaya.

Sementara faktor yang menjadi Penghambat capaian Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya adalah :

1. Belum teridentifikasinya seluruh objek diduga cagar budaya karena luasnya wilayah serta banyaknya potensi budaya yang tersebar di berbagai lokasi.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang cagar budaya dan inventarisasi, sehingga proses pendataan belum dapat dilakukan secara optimal.
3. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan survei lapangan, penelitian, dokumentasi, dan pengolahan data.
4. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya, sehingga informasi mengenai objek budaya belum terdokumentasikan secara baik.
5. Kondisi fisik beberapa objek yang telah rusak atau mengalami perubahan, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pendataan.

Alternatif Solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan pendataan dan inventarisasi secara berkala dan sistematis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan kerja sama dengan instansi atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan dan cagar budaya.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk membangun basis data digital warisan budaya dan objek diduga cagar budaya yang terintegrasi.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan komunitas budaya dalam proses identifikasi, pelaporan, dan pelestarian objek budaya.
5. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan survei, dokumentasi, penelitian, dan pengembangan sistem informasi kebudayaan.
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya sebagai aset sejarah, identitas daerah, dan sumber penguatan karakter bangsa.

#### **f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.87  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja  
Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar Tahun 2025

| Sasaran                                                                                            | Indikator Kinerja                                                     | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan objek diduga cagar budaya | Persentase inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya | 86,57           | 25                  | 61,57             |

Efisiensi capaian kinerja =  $86,57\% - 100\% = -13,43\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 25\% = 75\%$

Total Efisiensi =  $-13,43\% + 75\% = 61,57\%$

Efisiensi kinerja sebesar -13,43% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 75% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 61,57%,. Angka positif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Meningkatkan kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan objek diduga cagar sangat baik.

|                                                                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Sasaran 5 :</b></p> <p>Meningkatnya peran masyarakat Untuk memajukan kebudayaan dalam pengembangan Pariwisata</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**a. Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025:**

Tabel 3.88  
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                                                         | Target | Realisasi | %     | Predikat |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------|
| 1  | Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | 1,2    | 1,09      | 90,83 | Berhasil |

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan dan pengembangan pariwisata di suatu daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat berperan sebagai pelaku, pendukung, maupun penerima manfaat dari kegiatan budaya dan pariwisata. capaian Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata pada tahun 2025 adalah sebesar 1,09 jauh lebih rendah dari target 1,2 sehingga persentase capaian nya menjadi 90,83% dengan predikat berhasil. Meskipun mencapai target namun Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan dan pariwisata belum berkembang secara optimal. Rendahnya tingkat keterlibatan mengindikasikan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam hal sosialisasi, akses informasi, pembinaan komunitas, maupun minat dan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya dan pariwisata

gambar 3.17

kegiatan maulid gadang yang melibatkan Masyarakat



#### b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 Dan Tahun 2025

Tabel 3.89

Perbandingan Target dan Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan  
Dan Pariwisata Tahun 2024 dan 2025

| Satuan | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Interpretasi |
|--------|------------|------------|--------------|
|--------|------------|------------|--------------|

*Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2025*

| Indikator Kinerja Utama                                                   |   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |       |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|---------------------|-------|
| Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | % | -      | -         | -                   | 64     | 1,2       | 1,09                | 90,83 |

Pada tahun 2024, data target dan realisasi belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja pada periode tersebut. Sementara itu, pada tahun 2025, target keterlibatan masyarakat ditetapkan sebesar 64%, dengan realisasi sebesar 1,2%. Berdasarkan perhitungan kinerja, capaian yang diperoleh mencapai 90,83%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara persentase kinerja terhadap target yang ditetapkan telah tergolong baik, meskipun secara nominal realisasi keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan skala atau metode pengukuran yang digunakan dalam perhitungan indikator, sehingga perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut agar interpretasi data menjadi lebih tepat dan konsisten

#### c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.90

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra

| Indikator Kinerja Utama                                                   | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |      | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                                           |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | %      | 1,2          | 1,5  | 1,7  | 2    | 2,5  | 1,09              |      | -    | -    | -    |

Dari table diatas dapat dilihat capaian Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata hanya di tahun 2025 sebesar 1,09% hal tersebut dikarenakan periode awal renstra tahun 2025-2029.

Pada tahun 2025, realisasi keterlibatan masyarakat tercatat sebesar **1,09%**, yang sedikit lebih rendah dibandingkan target sebesar **1,2%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata telah berjalan, namun masih belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Sementara itu, data realisasi untuk tahun 2026 hingga 2029 belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap capaian pada periode tersebut. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih diperlukan penguatan strategi, peningkatan sosialisasi, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat agar target RPJMD dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

**d. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata adalah PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN dan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dengan subkegiatan :

- 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- 2) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- 3) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- 4) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 5) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.745.634.700,00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.271.470.618,00,- atau sekitar 73%.

**e. Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Keberhasilan capaian Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata didukung oleh beberapa Faktor yaitu :

1. Tingginya potensi budaya dan daya tarik wisata daerah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan dan pariwisata.

2. Dukungan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan event budaya, promosi pariwisata, pelatihan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat.
3. Keberadaan komunitas budaya, kelompok seni, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang aktif dalam pelestarian budaya dan pengembangan destinasi wisata.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat ekonomi dan sosial dari sektor kebudayaan dan pariwisata, seperti peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.
5. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam mendukung pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah.

Yang menjadi Faktor Penghambat capaian Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata sebagai aset daerah.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan destinasi wisata, pelayanan wisatawan, pemasaran, dan penyelenggaraan kegiatan budaya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan dan pariwisata, sehingga mengurangi minat dan partisipasi masyarakat.
4. Terbatasnya akses informasi dan promosi, yang menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan belum optimal.
5. Keterbatasan anggaran dan dukungan pembinaan berkelanjutan, terutama bagi komunitas budaya dan kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata.

Alternatif Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata sebagai sumber kesejahteraan dan identitas daerah.
2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi pelaku seni budaya, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, dan masyarakat yang terlibat dalam sektor pariwisata.

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan event budaya dan kegiatan pariwisata, baik sebagai pelaksana, peserta, maupun pengelola.
4. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung, sehingga masyarakat lebih mudah terlibat dalam aktivitas kebudayaan dan pariwisata.
5. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media untuk memperluas jangkauan promosi serta pemberdayaan masyarakat.
6. Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada komunitas budaya dan kelompok sadar wisata, baik dalam bentuk pembinaan, bantuan peralatan, maupun akses promosi dan pemasaran

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.91  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja

Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata Tahun 2025

| Sasaran                                                              | Indikator Kinerja                                                         | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Meningkatnya peran Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | Persentase keterlibatan Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | 90,83           | 73                  | 17,83             |

Efisiensi capaian kinerja =  $90,83\% - 100\% = -9,17\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 73\% = 27\%$

Total Efisiensi =  $-9,17\% + 27\% = 17,83\%$

Efisiensi kinerja sebesar -9,17% dan efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 27% dan Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 17,83,. Angka positif ini mengindikasikan bahwa efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Meningkatkan peran Masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata berjalan optimal..

## B .INOVASI

---

### 1. Inovasi RAMPAK (*Ramah Lingkungan dan Peduli anak* )

RAMPAK atau Ramah Lingkungan dan peduli anak adalah merupakan sebuah inovasi di dunia pendidikan yang mana inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan peduli anak. Dimana anak merasa nyaman berada di sekolah yang bisa membuat anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta lingkungan yang mendukung untuk bermain.

RAMPAK diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan dan peduli anak yakni berupa sekolah memfasilitasi sekolah yang ramah lingkungan dan peduli anak, sekolah membuat pojok literasi tempat bermain anak yang rindang dan sesuai dengan kebutuhan anak serta menunjang untuk pembelajaran anak sesuai usianya dan juga untuk bermain sehingga, mereka bisa belajar sambil bermain. Tentu! Ada beberapa ide yang bisa Anda pertimbangkan untuk merancang inovasi yang ramah lingkungan dan peduli anak di sekolah seperti:

- Adanya Taman Sekolah Berkelanjutan: Ubah area terbuka di sekolah menjadi taman hijau yang berkelanjutan. Gunakan teknik permaculture untuk menanam berbagai jenis tanaman yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga dapat menjadi sumber belajar bagi siswa. Selain itu, gunakan teknologi seperti irigasi tetes dan penggunaan energi surya untuk memastikan taman tersebut berkelanjutan.



### 2. INOVASI GERAKAN MILITER "*mengimplementasikan literasi*"

Gerakan militer gerakan “mengimplementasikan literasi” adalah meningkatkan kemampuan membaca dan menulis berpikir kritis peningkatan prestasi akademik korelasi dengan mata pelajaran lain, pengembangan karakter dan produk budi pekerti peningkatan kreativitas dan imajinasi stimulasi kreativitas membaca buku cerita novel dan literatur lainnya yang dapat merangsang imajinasi dan kreativitas peserta didik.

Persiapan untuk kehidupan di masa depan dan keterampilan hidup belakang inovasi gerakan militer atau gerakan mungkin fermentasikan literasi merupakan jenis Inovasi yang diluncurkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan budaya literasi pada Peserta Didik.



### 3. INOVASI UPAYA PRIMA

Upaya Prima merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk upaya pelestarian budaya daerah otoritas utama yang dilakukan oleh satuan pendidikan di PAUD SD SMP , beberapa landasan hukum undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi pasal 32 ayat 1 Pasal 21 ayat 2 seterusnya undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan yang meliputi pasal 1 ayat 1 Pasal 15 pasal 27 peraturan daerah di samping itu setiap daerah juga memiliki peraturan daerah Perda tentang kebudayaan yang memuat ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian budaya daerah contoh inovasi pelestarian budaya daerah berikut adalah beberapa contoh inovasi pelestarian budaya daerah yang telah dilakukan di Indonesia untuk menarik minat generasi muda pemanfaatan teknologi digital seperti melalui media sosial website dan aplikasi pembentukan komunitas budaya untuk melestarikan tradisi dan kearifan lokal libasan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya daerah seperti melalui

program edukasi dan pelatihan jadi inovasi dalam pelestarian budaya daerah tetang penting untuk menjaga kelestarian bangsa budaya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. landasan hukum yang kuat telah tersedia untuk mendukung upaya-upaya inovatif tersebut dengan kreativitas dan kerjasama dari semua pihak diharapkan budaya daerah di Indonesia dapat terus berkembang pelestarian budaya daerah itu sendiri yaitu yang pertama melestarikan warisan budaya barat Budaya daerah merupakan bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.



#### 4. INOVASI SIRATU BACA

Tingkat literasi dan Numerasi siswa Satuan Pendidikan SD dan SMP tergolong rendah Ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya literasi dan Numerasi Siswa, salah satunya yaitu minimnya fasilitas tempat literasi dan Numerasi disekolah. Praktek literasi dan Numerasi, merupakan gerakan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat literasi Numerasi siswa. Literasi dan Numerasi yang dibudayakan setiap hari akan membuat minat baca dan hitung siswa meningkat.

Dengan begitu frekuensi siswa untuk membiasakan Gerakan Implementasi Literasi dan Numerasi akan lebih baik dan lebih berkualitas. Lahirnya inovasi ini merupakan pembiasaan praktek baik siswa melalui implementasi Literasi. Hal ini akan sulit terwujud tanpa melibatkan pihak pihak yang lebih dekat berinteraksi dengan siswa, sesuai dengan pengamatan Gerakan Mengimplementasikan Literasi ini hanya mengandalkan apa yang didapatkan siswa disekolah saja. Latar Belakang Inovasi Gerakan Mengimplementasikan literasi dan Numerasi adalah:

- a. Dikalangan siswa masih banyak ditemukan, siswa yang sibuk dengan Game online. Dan malas untuk membaca buku dan belajar sendiri untuk berhitung. Sehingga prestasinya menurun dan siswa miskin dengan pengetahuan.
- b. Banyak siswa yang minat literasi dan Numerasinya masih kurang.
- c. Banyak siswa yang kebingungan dan malas saat di ajak masuk ke perpustakaan

Inovasi Siratubaca ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penerapan budaya positif pembiasaan literasi dan Numerasi siswa
- b. Sebagai langkah untuk menanamkan nilai-nilai pentingnya membaca dan berhitung kepada siswa.
- c. Diharapkan siswa mampu melaksanakan pembiasaan literasi dan Numerasi secara continue dan nyata setiap hari.



## 5. INOVASI CETAR MEMBAHAN (Cerdas Tanggap dan Responsif Membrantas Bahaya Narkolema)

Pengertian CETAR MEMBAHAN atau Cerdas Tanggap Membasmi Bahaya Narkolema adalah merupakan sebuah inovasi di dunia pendidikan yang mana inovasi ini bertujuan untuk membersihkan siswa dari bahaya NARKOLEMA. ( Narkoba Lewat Mata ) Apa itu Narkolema? Narkolema kepanjangan dari Narkotika Lewat Mata alias pornografi. Narkolema adalah pornografi

yang kita lihat baik gambar, alur cerita, foto, maupun video yang melanggar norma-norma kesusilaan. Di sebut narkoba lewat mata karena pornografi membuat seseorang itu kecanduan seperti dampak menggunakan narkoba dan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan mental serta kerusakan bagian otak. CETAR MEMBAHANA diselenggarakan dengan maksud untuk menjauhkan dan memberantas bahaya NARKOLEMA peserta didik dari yang sangat fatal yakni berupa kerusakan mental dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan otak bagian depan. Menurut American Psychological (2005) ada 7 level atau derajat orang yang ketergantungan terhadap pornografi. Level 1, apabila dalam satu tahun terpapar 1 – 2 kali pornografi dengan paparan yang ringan. Contohnya saat kita hendak membrowsing sesuatu namun yang muncul lintasan-lintasan iklan yang berbau pornografi dan kita melihatnya. Level 2, dalam satu tahun terpapar 2 – 6 kali terpapar pornografi dan dengan fantasi yang ringan. Level 3, tiap bulan sudah terpapar pornografi dan sudah mulai ada rasa bersalah dalam hati. Level 4, biasanya sudah mengganggu pekerjaan sehari-hari. Orang yang terpapar di level 4 biasanya dalam satu bulan bisa melakukan beberapa kali mengakses situs pornografi. Level 5, hampir tiap minggu sudah terpapar pornografi dan sudah ada efek – efek gejala penurunan fungsi PFC pada otak. Seperti seseorang berada di level 5 ini biasanya sudah tidak logis, mudah marah bila di peringati, tidak sabaran, lebih suka menyendiri atau mengunci diri, turunnya daya ingat dan konsentrasi, kurang berempati/ melupakan pekerjaan baik-baik. Level 6, hari-harinya sudah menonton pornografi. Bercandaannya, gaya bicaranya semuanya di kait-kaitkan dengan pornografi. Sudah mulai menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Level 7, orang yang berada di level 7 merasa putus asa jika tidak melihat pornografi atau konten-konten yang berbau pornografi. Dampak narkolema ini tidak bisa di anggap ringan karena jika seseorang sudah kecanduan pornografi dapat merusak 5 bagian otak terutama bagian otak PFC (pre frontal cortec) bagian otak ini berada di paling depan otak manusia dekat tulang dahi.

Tujuan dari Inovasi CETAR MEMBAHANA ini adalah :

- a. untuk menjauhkan dan memberantas peserta didik dari bahaya NARKOLEMA
- b. Sebagai langkah untuk menanamkan pemahaman pada peserta didik bahwa narkolema sangat berbahaya.
- c. Diharapkan siswa mampu menjaga dirinya dari pengaruh narkolema dengan menyibukkan dirinya dengan kegiatan kegiatan yang bermanfaat
- d. Siswa mampu mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya tanpa adanya gangguan narkolema



## 6. INOVASI BELAFREND

**Pembelajaran Berdiferensiasi** adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan kekuatan yang berbeda-beda. Dalam pendekatan ini, guru tidak lagi mengajar dengan satu metode yang sama untuk semua siswa, melainkan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual setiap siswa.



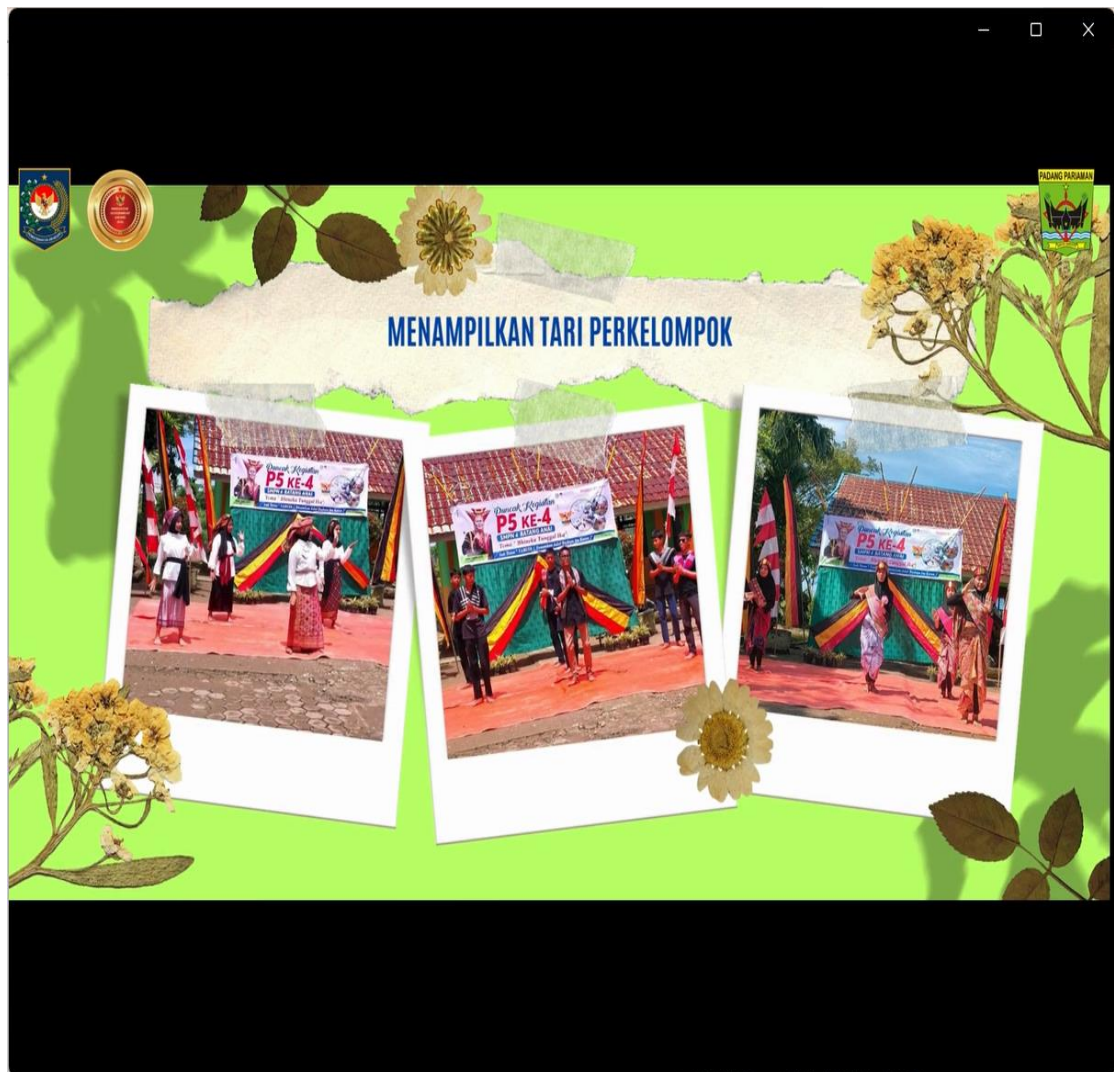
#### 7. INOVASI Siswa Bersih dari Narkoba (BERSINAR): Upaya Bersama Selamatkan Generasi Muda

Gerakan siswa bersih dari narkoba merupakan inisiatif yang sangat penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga siswa itu sendiri.



#### 8. INOVASI PROPELA "Profil Projek Pelajar Pancasila"

Pengertian PROPELA atau Penguatan Profil Profil Pelajar Pancasila adalah merupakan sebuah inovasi di dunia pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila Apa itu Proppela? Proppela kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah program pemerintah dalam implementasi Kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik mengembangkan segala kemampuannya melalui proyek keterlibatannya langsung dengan persoalan disekitarnya. Maksud Penyelenggaraan PROPELA Penyelenggaraan PROPELA (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) merupakan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.



## 9. INOVASI SIMPATIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah merombak banyak aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Inovasi pembelajaran berbasis TIK terus berkembang pesat, menawarkan pendekatan yang lebih menarik, interaktif, dan efektif dalam proses belajar-mengajar.

Inovasi daerah SIMPATIK (Simak Pelajari Pembelajaran Berbasis TIK) adalah langkah yang menarik untuk meningkatkan pendidikan di wilayah tersebut.



#### 10. INOVASI LEKAT GUNA (Lebih Dekat dengan Lagu Nasional)

Inovasi lekat guna (lebih dekat dengan lagu nasional) merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk menggalakan lagi nasionalisme kepada murid di PAUD SD dan SMP. Di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang inovasi antara lain undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertuang pada pasal 27 ayat 3 serta pasal 33 ayat 3 undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional inovasi, lagu nasional meskipun lagu nasional dapat dikaitkan dengan semangat inovasi seperti Indonesia Raya, lagu ini membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang dapat mendorong masyarakat untuk berinovasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa lagu ini menekankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, serta lagu Bangun Pemuda Pemudi lagu ini mendorong para pemuda untuk berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa.



#### 11. Inovasi SIMPELS (Sikap Peduli Lingkungan Sekolah)

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan Pendidikan SD dan SMP masih tergolong rendah. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sekolah, salah satunya yaitu minimnya kepedulian masyarakat disekolah. Simpels merupakan gerakan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sekolah. Simpels memberikan kesadaran terhadap kepedulian masyarakat untuk selalu peduli

terhadap di mana saja berada. Dengan begitu siswa untuk terbiasa hidup tertib dan disiplin di mana saja berada serta menerapkan budaya positif

Lahirnya inovasi ini merupakan pembiasaan mulai dari praktek kepedulian masyarakat dan memberikan perhatian kepada siswa setiap hari, akan sulit terwujud tanpa melibatkan pihak-pihak yang lebih dekat berinteraksi dengan siswa, sesuai dengan pengamatan pembiasaan menjaga kepedulian masyarakat ini hanya mengandalkan apa yang dilakukan siswa di sekolah saja. Latar Belakang Inovasi Simpel ini adalah : a. Dikalangan siswa masih banyak ditemukan, yang kepeduliannya terhadap sekolah itu kurang. b. Banyak siswa suka cabut dan bahkan ada yang tidak sampai ke sekolah. c. Banyak siswa belum memiliki budaya positif di sekolah.



## 12. INOVASI JUMPA BERLIAN (Jumat Pagi Bersih Lingkungan)

Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman ” jumpa berlian” Jumat pagi bersihkan lingkungan jumpa berliannya yaitu jumat pagi bersihkan lingkungan, inovasi ini merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk berupaya menggalakkan kebersihan di Jumat pagi pada murid PAUD SD dan SMP agar terbiasa untuk hidup bersih dan sehat.

inovasi daerah berikut pernyataan dan klasifikasi sampah melakukan pemetaan dan klasifikasi sampah sampai di setiap wilayah untuk menentukan strategi pengelolaan sampah yang tepat pendekatan edukasi dan kreatif mengembangkan materi edukasi yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan minat Masyarakat khususnya anak-anak dan menjaga kebersihan lingkungan.



### C. REALISASI ANGGARAN

---

Realisasi anggaran merujuk pada sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan untuk suatu program, proyek, atau kegiatan telah digunakan atau dihabiskan dalam periode waktu tertentu. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi pengeluaran serta perbandingan antara anggaran awal dan pengeluaran aktual.

Realisasi anggaran penting karena membantu dalam mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik atau swasta. Ketika realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana awal, hal itu bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam perencanaan atau pelaksanaan, yang memerlukan tindakan korektif.

Untuk realliasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025**

| URAIAN URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                | ANGGARAN 2025             | REALISASI 2025            | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>                                                | <b>604.060.374.227,41</b> | <b>423.553.756.892,00</b> | <b>70%</b>     |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                | <b>601.779.497.027,41</b> | <b>422.146.180.487,00</b> | <b>70,15%</b>  |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                          | <b>601.703.183.027,41</b> | <b>422.073.704.447,00</b> | <b>70,15%</b>  |
| <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>                                                | <b>601.503.684.027,41</b> | <b>422.008.076.447,00</b> | <b>70,16%</b>  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>505.499.322.073,41</b> | <b>333.523.300.948,00</b> | <b>65,98%</b>  |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>40.000.000,00</b>      | <b>20.008.540,00</b>      | <b>50,02%</b>  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 20.000.000,00             | 12.730.840,00             | 63,65%         |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.000.000,00             | 7.277.700,00              | 36,39%         |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>505.125.701.843,41</b> | <b>333.242.441.909,00</b> | <b>65,97%</b>  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 504.265.433.843,41        | 332.460.241.909,00        | 65,93%         |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 860.268.000,00            | 782.200.000,00            | 90,93%         |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>5.115.000,00</b>       | <b>5.115.000,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 5.115.000,00              | 5.115.000,00              | 100,00%        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>29.206.500,00</b>      | <b>18.345.689,00</b>      | <b>62,81%</b>  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 3.255.500,00              | 3.255.500,00              | 100,00%        |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 10.000.000,00             | 6.420.189,00              | 64,20%         |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 15.951.000,00             | 8.670.000,00              | 54,35%         |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>267.483.730,00</b>     | <b>229.585.810,00</b>     | <b>85,83%</b>  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 14.538.000,00             | 14.527.000,00             | 99,92%         |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 36.905.104,00             | 31.079.616,00             | 84,21%         |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 216.040.626,00            | 183.979.194,00            | 85,16%         |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>31.815.000,00</b>      | <b>7.804.000,00</b>       | <b>24,53%</b>  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | 4.315.000,00              | 1.920.000,00              | 44,50%         |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | 27.500.000,00             | 5.884.000,00              | 21,40%         |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                 | <b>95.743.615.554,00</b>  | <b>88.237.369.799,00</b>  | <b>92,16%</b>  |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                           | <b>62.207.739.356,00</b>  | <b>60.548.151.903,00</b>  | <b>97,33%</b>  |
| Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                      | 73.152.687,00             | 73.152.687,00             | 0,00%          |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | 2.648.120.000,00          | 2.075.164.304,00          | 78,36%         |

|                                                                                                     |                          |                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | 815.885.911,00           | 800.749.511,00           | 98,14%        |
| Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                      | 345.460.000,00           | 304.208.390,00           | 88,06%        |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | 169.877.000,00           | 121.566.000,00           | 71,56%        |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                    | 7.338.887.000,00         | 7.091.350.000,00         | 96,63%        |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar            | 18.089.000,00            | 18.050.560,00            | 99,79%        |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | 792.120.000,00           | 707.904.520,00           | 89,37%        |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                  | 41.468.173.785,00        | 41.462.421.767,00        | 99,99%        |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                            | 20.000.000,00            | 19.821.450,00            | 99,11%        |
| Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                              | 68.460.731,00            | 68.460.731,00            | 0,00%         |
| Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       | 4.170.000,00             | -                        | 0,00%         |
| Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                | 2.734.197.455,00         | 2.284.787.142,00         | 83,56%        |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | 548.200.000,00           | 538.669.669,00           | 98,26%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | 1.017.200.000,00         | 1.012.756.700,00         | 99,56%        |
| Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan      | 197.000.000,00           | 162.400.000,00           | 82,44%        |
| Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                   | 6.540.000,00             | 6.540.000,00             | 100,00%       |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 3.434.956.787,00         | 3.405.204.884,00         | 99,13%        |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                     | 507.249.000,00           | 394.943.588,00           | 77,86%        |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                              | <b>22.809.105.098,00</b> | <b>20.549.897.328,00</b> | <b>90,10%</b> |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 150.000.000,00           | 149.502.663,00           | 99,67%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 350.000.000,00           | 329.162.124,00           | 94,05%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                      | 100.000.000,00           | 99.667.809,00            | 0,00%         |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | 220.000.000,00           | 219.041.157,00           | 99,56%        |
| Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | 915.000.000,00           | 871.722.975,00           | 95,27%        |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | 213.551.000,00           | 49.859.475,00            | 23,35%        |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 1.464.000.000,00         | 1.359.000.000,00         | 92,83%        |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 26.976.000,00            | 4.850.000,00             | 17,98%        |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | 735.640.000,00           | 385.560.000,00           | 52,41%        |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | 16.746.557.098,00        | 16.688.385.658,00        | 99,65%        |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | 20.000.000,00            | 16.932.000,00            | 84,66%        |
| Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                   | 7.100.000,00             | 7.100.000,00             | 100,00%       |

|                                                                                                 |                         |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                            | 1.565.000.000,00        | 77.459.965,00           | 4,95%         |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                 | 295.281.000,00          | 291.653.502,00          | 98,77%        |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                                             | <b>8.829.561.600,00</b> | <b>6.074.893.282,00</b> | <b>68,80%</b> |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                 | 418.320.000,00          | 410.474.281,00          | 98,12%        |
| Pengadaan Mebel PAUD                                                                            | 154.306.500,00          | 136.616.980,00          | 88,54%        |
| Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                                     | 128.740.000,00          | 122.392.950,00          | 95,07%        |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                    | 1.764.000.000,00        | 1.764.000.000,00        | 100,00%       |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                 | 69.753.600,00           | 69.563.300,00           | 99,73%        |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                        | 122.700.000,00          | 115.790.800,00          | 94,37%        |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                 | 4.380.000.000,00        | 1.891.259.026,00        | 43,18%        |
| Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  | 44.410.000,00           | 44.066.081,00           | 99,23%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                   | 75.000.000,00           | 74.109.380,00           | 98,81%        |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                                            | 992.947.000,00          | 786.631.563,00          | 79,22%        |
| Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                             | 50.479.500,00           | 50.479.500,00           | 100,00%       |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                   | 628.905.000,00          | 609.509.421,00          | 96,92%        |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                              | <b>1.897.209.500,00</b> | <b>1.064.427.286,00</b> | <b>56,10%</b> |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         | 120.000.000,00          | 120.000.000,00          | 100,00%       |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 40.020.000,00           | 39.190.297,00           | 97,93%        |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                | 12.669.500,00           | 12.584.700,00           | 99,33%        |
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               | 1.091.900.000,00        | 407.112.000,00          | 37,28%        |
| Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                            | 15.000.000,00           | 13.517.500,00           | 90,12%        |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                    | 300.000.000,00          | 284.601.553,00          | 94,87%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                | 140.000.000,00          | 138.609.196,00          | 99,01%        |
| Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                               | 37.620.000,00           | 21.600.000,00           | 57,42%        |
| Pengadaan Mebel Sekolah                                                                         | 20.000.000,00           | 19.012.040,00           | 95,06%        |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan                          | 120.000.000,00          | 8.200.000,00            | 6,83%         |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                                           | <b>51.999.000,00</b>    | <b>51.544.000,00</b>    | <b>99,12%</b> |
| <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>      | <b>51.999.000,00</b>    | <b>51.544.000,00</b>    | <b>99,12%</b> |
| Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 51.999.000,00           | 51.544.000,00           | 99,12%        |

|                                                                                                                                                      |                         |                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                                                                      | <b>208.747.400,00</b>   | <b>195.861.700,00</b>   | <b>93,83%</b> |
| <b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>    | <b>208.747.400,00</b>   | <b>195.861.700,00</b>   | <b>93,83%</b> |
| Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                         | 4.920.000,00            | 4.830.000,00            | 98,17%        |
| Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                    | 203.827.400,00          | 191.031.700,00          | 93,72%        |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                         | <b>2.280.877.200,00</b> | <b>1.407.576.405,00</b> | <b>99,12%</b> |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                                                                                         | <b>2.280.877.200,00</b> | <b>1.407.576.405,00</b> | <b>99,12%</b> |
| <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>                                                                                                               | <b>2.280.877.200,00</b> | <b>1.407.576.405,00</b> | <b>99,12%</b> |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>                                                                                                               | <b>1.721.909.700,00</b> | <b>1.271.470.618,00</b> | <b>73,84%</b> |
| <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                  | <b>40.994.004,00</b>    | <b>9.530.000,00</b>     | <b>23,25%</b> |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                       | 40.994.004,00           | 9.530.000,00            | 23,25%        |
| <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                        | <b>1.680.915.696,00</b> | <b>1.261.940.618,00</b> | <b>75,07%</b> |
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 | 351.892.000,00          | 162.039.398,00          | 46,05%        |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      | 1.284.543.696,00        | 1.097.951.220,00        | 85,47%        |
| Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 44.480.000,00           | 1.950.000,00            | 4,38%         |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>                                                                                                     | <b>23.725.000,00</b>    | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>  |
| <b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                      | <b>23.725.000,00</b>    | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>  |
| Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                                        | 23.725.000,00           | -                       | 0,00%         |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>                                                                                                                     | <b>66.355.000,00</b>    | <b>22.308.198,00</b>    | <b>33,62%</b> |
| <b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                  | <b>66.355.000,00</b>    | <b>22.308.198,00</b>    | <b>33,62%</b> |
| Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah                                                                                     | 66.355.000,00           | 22.308.198,00           | 33,62%        |
| <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                                                                                              | <b>468.887.500,00</b>   | <b>113.797.589,00</b>   | <b>24,27%</b> |
| <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>                                                                                               | <b>224.107.500,00</b>   | <b>72.248.000,00</b>    | <b>32,24%</b> |
| Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                                                                | 174.177.500,00          | 23.798.000,00           | 13,66%        |
| Penetapan Cagar Budaya                                                                                                                               | 49.930.000,00           | 48.450.000,00           | 97,04%        |
| <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>                                                                                             | <b>244.780.000,00</b>   | <b>41.549.589,00</b>    | <b>16,97%</b> |
| Pelindungan Cagar Budaya                                                                                                                             | 244.780.000,00          | 41.549.589,00           | 16,97%        |

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

---

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan, walaupun secara kuantitas maupun kualitas sangat terbatas. Dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pada pencapaian kinerja di tahun 2025 ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan LAKIP Tahun 2025 yaitu terkendala dalam pengumpulan data, pencatatan, pelaporan dan evaluasi kinerja dari masing-masing bidang terkait

### **B. LANGKAH KE DEPAN**

---

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Penyediaan Dana Operasional TK Pembina Kecamatan dan TK Pembina Kabupaten, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bidang PAUD dan Pendidikan Non formal yang akan menarik minat siswa maupun orang tua murid agar anak usia 4-6 Tahun dapat mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini.]
2. Serta tetap dapat melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA agar dapat meningkatkan APK SD maupun SMP. Serta dapat mengurangi angka putus sekolah untuk dapat menambah kegiatan dananya.
3. Dari segi hal Jumlah siswa SD/SMP agar mendapatkan prestasi lebih baik, baik tingkat Kabupaten, tingkat provinsi maupun Nasional. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap dapat menganggarkan bahkan menambah anggaran kegiatan baik yang bersifat kabupaten, provinsi maupun Nasional, berupa olimpiade-olimpiade maupun festival. Yang nantinya akan membawa nama Kab. Padang Pariaman ke depannya.
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas seni tradisional, budaya daerah, cagar budaya dan keurbakalaan tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan perlombaan pidato adat, pelatihan seni anak sekolah, fasilitasi

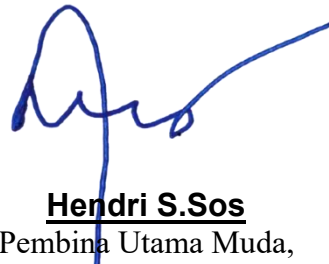
bundo kanduang, LKAAM, pemeliharaan benda dan bangunan situs cagar budaya, pembuatan laga-laga medan nan bapaneh, pembinaan kesenian tradisional, pendataan nilai sejarah dan tradisi, bimbingan teknis sejarah dan tradisi, serta dokumentasi digitalisasi fasilitas pembinaan sanggar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat menambah anggaran pada tahun mendatang, tapi anggaran yang tersedia kena rasionalisasi anggaran Pilkada Serentak.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Terimakasih

Parik Malintang, 30 maret 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**Hendri S.Sos**

Pembina Utama Muda,  
(IV/c) NIP.19720401 199303 1 005

## LAMPIRAN

## 1. PERJANJIAN KINERJA (PK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ANWAR, M.Si  
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHATRI BUR  
 Jabatan : Bupati Padang Pariaman  
 Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



**SUHATRI BUR**

Parit Malintang, 02 Januari 2025  
 Pihak Pertama,



**Drs. Anwar, M.Si**  
 NIP.19670210 198903 1 007

20/68 7 1/2% 4 1/2% 4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

| No  | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                                              | Target |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                            | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan          | Angka partisipasi murni (APM) SD                                               | 100    |
|     |                                                     | Angka partisipasi murni (APM) SMP                                              | 85     |
|     |                                                     | Angka partisipasi kasar (APK) Paud                                             | 62.3   |
|     |                                                     | Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | 95%    |
|     |                                                     | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4                                | 98%    |
| 2.  | Meningkatnya perlindungan Warisan budaya.           | Persentase cagar budaya yang dilindungi                                        | 90%    |
|     |                                                     | Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi                            | 100%   |
| 3.  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat                                | 80,05  |

| Program                                             | Anggaran            | Ket |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1. Program Penunjang Urusan                         | Rp. 615.415.370.813 |     |
| 2. Program Pengelolaan Pendidikan                   | Rp. 89.580.545.600  |     |
| 3. Program Pengembangan Kurikulum                   | Rp. 60.129.000      |     |
| 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan         | Rp. 343.688.000     |     |
| 5. Program Pengembangan Kebudayaan                  | Rp. 1.217.078.000   |     |
| 6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional        | Rp. 30.000.000      |     |
| 7. Program Pembinaan Sejarah                        | Rp. 52.000.000      |     |
| 8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. 292.710.000     |     |

BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR

Parit Malintang, 02 Januari 2025  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN PADANG PARIAMAN

Drs. Arwar, M.Si  
 NIP.19670210-198903-1-007

Paraf Verifikasi

Kd. Danelatangda

Imbu

Paraf Verifikasi

## 2. PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI, S.Sos  
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS  
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

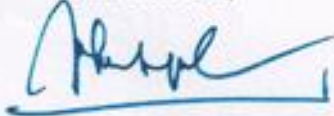
1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin guru dan tenaga kependidikan serta kebersihan, keamanan dan kenyamanan sekolah yang berada dalam kewenangan Dinas.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Parit Malintang, 16 Desember 2025

Pihak Pertama,



HENDRI, S.Sos  
NIP. 197204011993031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

| No  | Sasaran Strategis                                                                                  | Indikator Kinerja                                                         | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                | (3)                                                                       | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah                      | Nilai AKIP perangkat daerah                                               | 77,7   |
| 2.  | Meningkatnya standar dan mutu pendidikan                                                           | Indeks SPM Pendidikan                                                     | 72,50  |
| 3.  | Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan                                                       | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                                        | 51,55  |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                          | 119,3  |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                         | 98,1   |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun                              | 51,35  |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Murni (APM) SD                                          | 91,68  |
|     |                                                                                                    | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                         | 80,32  |
|     |                                                                                                    | Rasio Murid terhadap Guru PAUD                                            | 11,558 |
|     |                                                                                                    | Rasio Murid terhadap Guru SD                                              | 13     |
|     |                                                                                                    | Rasio Murid terhadap Guru SMP                                             | 14     |
|     |                                                                                                    | Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS)                                       | 6,5%   |
|     |                                                                                                    | Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD               | 0,0201 |
|     |                                                                                                    | Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD                   | 0,0098 |
|     |                                                                                                    | Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP                 | 0,0028 |
| 4   | Meningkatnya kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan objek diduga cagar budaya | Persentase Inventarisasi warisan budaya dan objek digduga cagar budaya    | 66%    |
| 5   | Meningkatnya peran masyarakat untuk memajukan kebudayaan dalam pengembangan pariwisata             | Persentase keterlibatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | 1,2%   |

|                                                          |                                                   |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| untuk Memajukan Kebudayaan dalam Pengembangan Pariwisata | Masyarakat dalam Bidang Kebudayaan dan Pariwisata |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|

| Program                                                      | Anggaran               | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 505.499.322.073,41 |            |
| 2. Program Pengelolaan Pendidikan                            | Rp. 95.804.784.671     |            |
| 3. Program Pengembangan Kurikulum                            | Rp. 51.999.000         |            |
| 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                  | Rp. 208.747.400        |            |
| 5. Program Pengembangan Kebudayaan                           | Rp. 2.280.877.200      |            |
| 6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional                 | Rp. 23.725.000         |            |
| 7. Program Pembinaan Sejarah                                 | Rp. 66.355.000         |            |
| 8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya          | Rp. 468.887.500        |            |
| Jumlah                                                       | Rp. 604.404.697.844,41 |            |

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

 Parit Malintang, 16 Desember 2025  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



 HENDRI, S.Sos  
 NIP. 197204011993031005

| Paraf Verifikasi  |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka. Bapelitbangda |  |
| Inspektur         |  |
| Kabag Organisasi  |  |

### 3. SK IKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021-2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN</b><br/><b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b><br/><small>Pauh Pari Marang (Komplek SDN 11 Eran Lingsung) Kode Pos. 35584 e-mail: dika_pdgmd@ yahoo.co.id</small></p> <hr/> <p><b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b><br/><b>KABUPATEN PADANG PARIAMAN</b><br/><b>NOMOR 4821 /KEP/DISDIKBUD/2023</b><br/><b>TENTANG</b><br/><b>PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b><br/><b>KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026</b></p> <p><b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES</b><br/><b>ESABUPATI PADANG PARIAMAN,</b></p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;</p> <p>b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dan unit kerja;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan, . .</p> | <p>Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Dr. ANWAR M. Si  
NIP. 19670210 198903 1 007

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN****NOMOR : 4821/KEP/DISDIKBUD/2023****TANGGAL : 03 JANUARI 2023****TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026****INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS                          | INDIKATOR KINERJA                                   | SATUAN     | PENJELASAN                                                                                                                   | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya perlindungan Warisan budaya.  | Persentase cagar budaya yang dilindungi             | Persentase | Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi) dibagi jumlah cagar budaya yang terdata kali 100 %                    | DISDIKBUD        |
|    |                                            | Persentase warisan budaya tak benda yang dilindungi | Persentase | Jumlah warisan budaya tak benda yang dilindungi dibagi jumlah total warisan budaya yang ditetapkan kali 100 %                | DISDIKBUD        |
| 2  | Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan | Angka partisipasi murni (APM) SD                    | Persentase | Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun kali 100 %   | DISDIKBUD        |
|    |                                            | Angka partisipasi murni (APM) SMP                   | Persentase | Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun kali 100 % | DISDIKBUD        |
|    |                                            | Angka partisipasi kasar (APK) Paud                  | Persentase | Total siswa tiap                                                                                                             | DISDIKBUD        |

|   |                                                     |                                                                                |            |                                                                                                |           |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                                     |                                                                                |            | jenjang pendidikan sederajat dibagi penduduk usia sekolah di jenjang tersebut kali 100 %       |           |
|   |                                                     | Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan | Persentase | Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik dibagi total satuan pendidikan kali 100 % | DISDIKBUD |
|   |                                                     | guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4                                           | Persentase | Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 dibagi Jmlah total seluruh guru kali 100 %                | DISDIKBUD |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat                                | nilai      | Nilai sakip hasil evaluasi inspektorat                                                         | DISDIKBUD |

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Padang Pariaman



Drs. ANWAR M.Si  
NIP. 19670210 198903 1 007

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>5. SK IKU TAHUN 2025-2029</b> |
|----------------------------------|



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR: 800/1200/KEP/DISDIKBUD/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Indikator Kinerja Utama harus bersifat *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 385);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

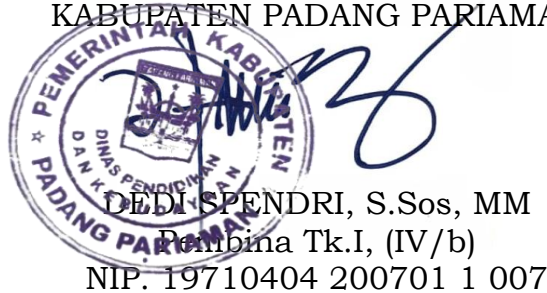
Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parik Malintang

Pada tanggal 15 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



DEDI SPENDRI, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I, (IV/b)  
NIP. 19710404 200701 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : /KEP/DISDIKBUD/2025

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029

| NO | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA                  | SATUAN | RUMUS PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya standar dan mutu pendidikan     | Indeks SPM Pendidikan (Indeks)     | Indeks | $\sum_{i=1}^n (w_i \times S_i)$ <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Wi : Bobot dari setiap indikator SPM (ditetapkan berdasarkan prioritas atau regulasi).</li> <li>❖ Si: Skor pencapaian masing-masing indikator SPM (biasanya dalam skala 0-100 atau 0-1).</li> <li>❖ n: Jumlah indikator yang digunakan</li> </ul> | Disdikbud        |
| 2  | Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | Angka  | (Jumlah peserta didik di jenjang PAUD : jumlah seluruh anak usia 3-6) × 100                                                                                                                                                                                                                                                | Disdikbud        |
|    |                                              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD   | Angka  | (Jumlah peserta didik di jenjang SD/ sederajat: jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100                                                                                                                                                                                                                                     | Disdikbud        |
|    |                                              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  | Angka  | (Jumlah peserta didik di jenjang SD/ sederajat: jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100                                                                                                                                                                                                                                    | Disdikbud        |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA                                           | SATUAN     | RUMUS PENGHITUNGAN                                                                                                                  | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                   | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 5-6 Tahun                | Angka      | (Jumlah anak usia 5-6 tahun yang bersekolah di PAUD : jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun) x 100                                     | Disdikbud        |
|    |                   | Angka Partisipasi Murni (APM) SD                            | Angka      | (Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat : total jumlah anak usia 7-12) x 100    | Disdikbud        |
|    |                   | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                           | Angka      | (Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan jenjang SMP/ sederajat : total jumlah anak usia 13-15) x 100 | Disdikbud        |
|    |                   | Rasio Murid terhadap Guru PAUD                              | Rasio      | Jumlah murid PAUD : Jumlah guru PAUD                                                                                                | Disdikbud        |
|    |                   | Rasio Murid terhadap Guru SD                                | Rasio      | Jumlah Murid SD : Jumlah Guru SD                                                                                                    | Disdikbud        |
|    |                   | Rasio Murid terhadap Guru SMP                               | Rasio      | Jumlah Murid SMP : Jumlah Guru SMP                                                                                                  | Disdikbud        |
|    |                   | Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS)                         | Persentase | Jumlah Anak Tidak Sekolah / Jumlah Penduduk Usia Sekolah (Usia 7-18 Tahun) x 100                                                    | Disdikbud        |
|    |                   | Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia PAUD | Rasio      | (Jumlah Satuan Pendidikan PAUD : Jumlah Penduduk Usia PAUD (5-6 tahun)                                                              | Disdikbud        |
|    |                   | Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia SD     | Rasio      | Jumlah Satuan Pendidikan SD: Jumlah Penduduk Usia SD ( 7-12 Tahun)                                                                  | Disdikbud        |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                         | SATUAN     | RUMUS PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                                    | Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia SMP                 | Rasio      | (Jumlah Satuan Pendidikan SMP : Jumlah Penduduk Usia SMP (13-15 Tahun))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disdikbud        |
| 3. | Meningkatnya kualitas inventarisasi pelestarian warisan budaya benda dan objek diduga cagar budaya | Persentase Inventarisasi warisan budaya dan objek diduga cagar budaya     | Persentase | Jumlah Warisan Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya yang Telah Diinventarisasi : Total Perkiraan Warisan Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya (Terdada) )x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disdikbud        |
| 4. | Meningkatnya peran masyarakat Untuk memajukan kebudayaan dalam pengembangan Pariwisata             | Persentase keterlibatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan pariwisata | Persentase | (Jumlah Masyarakat yang Terlibat : Jumlah Total Populasi Sasaran) x 100%<br>Masyarakat yang Terlibat :<br>❖ Peserta kegiatan budaya (misalnya, pelaku seni tradisional dll).<br>❖ Anggota komunitas pelestarian cagar budaya (misalnya, rumah gadang di Padang Pariaman).<br>❖ Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata (misalnya, Pantai Kata atau situs sejarah).<br>❖ Relawan atau peserta pelatihan terkait kebudayaan dan pariwisata<br>Total Populasi Sasaran : | Disdikbud        |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RUMUS PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                   |                   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Total penduduk dewasa di wilayah sasaran (misalnya, usia 15-64 tahun).</li> <li>❖ Populasi di wilayah sekitar destinasi wisata atau cagar budaya.</li> <li>❖ Anggota komunitas tertentu (misalnya, kelompok seni atau pelaku usaha pariwisata)</li> </ul> |                  |

Ditetapkan di Parik Malintang

Pada tanggal 15 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN



DEDI SPENDRI, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP. 19710404 200701 1 007

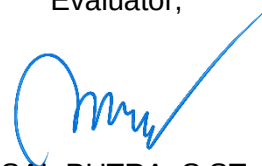
## HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| NO  | NAMA DOKUMEN                                                  | HASIL PRAEVALUASI |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | RPJMD Priode 2025 – 2029                                      |                   |
| 2.  | Renstra Priode 2025 – 2029                                    |                   |
| 3.  | Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029                |                   |
| 4.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2025                                 |                   |
| 5.  | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025                       |                   |
| 6.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2026                                 |                   |
| 7.  | LKJiP Tahun 2025                                              | ✓                 |
| 8.  | Rencana Aksi Tahun 2025                                       |                   |
| 9.  | Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025                             |                   |
| 10. | Rencana Aksi Tahun 2026                                       |                   |
| 11. | IKU Priode 2025-2029                                          |                   |
| 12. | Renja Tahun 2025                                              |                   |
| 13. | Renja Perubahan Tahun 2025                                    |                   |
| 14. | Renja Tahun 2026                                              |                   |
| 15. | Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026 |                   |
| 16. | Pedoman Teknis Perencanaan 2026                               |                   |
| 17. | Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026   |                   |
| 18. | Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026          |                   |
| 19. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026                       |                   |
| 20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025                      |                   |
| 21. | SOTK                                                          |                   |

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(BUDI MAISAL PUTRA, S.ST, QRM0 )

| REVISI BERJENJANG |                                                                                     |          |                                                                                     |          |                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Tim         |                                                                                     | Dainis   |                                                                                     | Wanjab   |                                                                                       |
| Tanggal           | Paraf                                                                               | Tanggal  | Paraf                                                                               | Tanggal  | Paraf                                                                                 |
| 25/06-26          |  | 25/06-26 |  | 25/06-26 |  |